

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, dalam pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi :

- A. Kerjasama Antar Daerah
- B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
- C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
- D. Pembinaan Batas Wilayah
- E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
- F. Pengelolaan Kawasan Khusus yang menjadi kewenangan daerah
- G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- H. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan dan menyelenggarakan beberapa tugas umum pemerintahan, yaitu :

#### **A. Kerjasama Antar Daerah**

Dalam rangka peningkatan kerjasama sesuai dengan amanat Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kemudian sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah ditegaskan bahwa kerjasama daerah dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama. Kerjasama tersebut dapat diprakarsai atau ditawarkan oleh Menteri, Kepala Daerah ataupun pihak ketiga yang akan bekerjasama.

Kerjasama daerah merupakan wadah atau sarana untuk lebih memantapkan hubungan serta keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka NKRI, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh

urusan yang menjadi kewenangan daerah, potensi daerah, aset daerah serta penyediaan pelayanan publik.

## **1. Program dan Kegiatan**

Program Kerjasama Pembangunan pada Biro Pembangunan, Kerjasama dan Rantau yang dirincikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Perantau Minang di Bidang Sosbud dan Ekonomi.
- b. Pendataan Perantau Minang di Nagari/Kelurahan.
- c. Peningkatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang.
- d. Pembentukan dan Pembinaan Nagari/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau.
- e. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang di Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi.
- f. Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah.
- g. Kerjasama Luar Negeri.
- h. Kerjasama Pihak Ketiga.
- i. Kerjasama Antar Provinsi.
- j. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian atau Lembaga.
- k. Monitoring Kerjasama Dalam dan Luar Negeri.

## **2. Realisasi Program dan Kegiatan**

Berikut dijelaskan beberapa kegiatan kerjasama daerah di Provinsi Sumatera Barat yang terfasilitasi melalui Program Kerjasama Pembangunan, antara lain :

- a. Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Perantau Minang di Bidang Sosbud dan Ekonomi dengan anggaran Rp.360.886.728,- dengan realisasi sebesar Rp.355.432.167,- (80,71%).

### **1) Output**

Pada Tahun 2018 pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dengan rincian sebagai berikut :

- Provinsi Riau pada tanggal 6 Mei 2018 di Hotel Pangeran Pekanbaru, dengan hasil :
  - Beberapa perantau minang yang berada di Provinsi Riau berkeinginan untuk melakukan kerjasama di bidang pangan dengan petani melalui Gapoktan yang

akan difasilitasi oleh Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.

- Provinsi Lampung pada tanggal 26 Juli 2018 di Emersia Hotel dan Resort Lampung, dengan hasil :
  - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Perantau minang yang tergabung didalam Gerakan Ekonomi dan Budaya (GEBU) Minang Provinsi Lampung menyepakati untuk menggali lebih dalam semua potensi dan peluang kerjasama yang ada Sumatera Barat, di bidang komoditi Ikan darat, ikan hias, tambak udang, eko wisata, perhotelan/home stay dengan menggunakan perumahan penduduk, kedai kopi di Bandara, pengelolaan sabut kelapa, I-ternak/penggemukan sapi, infastruktur/batching plant, pembangunan pelabuhan dan pengolahan keripik sanjai.
- Provinsi Makassar pada tanggal 15 November 2018 di Hotel Singgasana Makassar dengan hasil :
  - Terwujudnya kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Ikatan Keluarga Minang (IKM) Sapayuang SULSELBAR terkait dukungan promosi Pariwisata serta promosi produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Sumatera Barat dengan Ketua IKM Sapayuang SULSELBAR.
- Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 November 2018 di Hotel Balairung Jakarta dengan hasil :
  - Terwujudnya kerjasama antara Pengusaha Rumah Makan dengan gabungan kelompok tani (Gapoktan) dibawah binaan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat didalam menyuplai kebutuhan beras untuk Rumah Makan Padang di Jakarta dan Investasi di Bidang penggemukan Sapi melalui aplikasi I-Ternak yang dikelola oleh Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat.

## **2) Outcomes**

Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan perantau minang di bidang sosial budaya dan ekonomi dan kontribusi perantau minang di nagari/desa/kelurahan.

### 3) Permasalahan dan Solusi

Masih kurangnya perantau yang potensial hadir dalam acara pertemuan pemerintah daerah dengan perantau minang mengakibatkan tidak semua potensi dan peluang kerjasama yang telah dipaparkan dapat ditindak lanjuti melalui Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama. Solusi dari kurangnya kehadiran perantau potensial pada setiap kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan merubah bentuk kegiatan seperti yang dilaksanakan di DKI Jakarta, pada tanggal 30 November 2018, dimana perantau yang diundang adalah perantau yang benar-benar potensial di bidang usaha mereka masing-masing, seperti pengusaha Rumah Makan Padang, pengusaha Tour & Travel dan pengusaha Hotel sehingga semua potensi dan peluang kerjasama yang dipaparkan dan dimiliki oleh Sumatera Barat dapat ditangkap langsung oleh perantau minang dan dapat ditindak lanjuti melalui Nota Kesepakatan maupun Perjanjian Kerjasama.

- b. Pendataan Perantau Minang di Nagari/Kelurahan dengan anggaran Rp.18.312.600,- dengan realisasi sebesar Rp.18.312.600,- (100%).

#### 1) Output

Adapun data perantau yang diperoleh selama tahun 2018 sebagai berikut :

- Data Perantau Minang Di Provinsi Lampung.

Terdatanya Sebanyak 86 perantau Minang di Provinsi Lampung yang terdaftar sebagai anggota organisasi Gebu Minang Lampung.

- Data Perantau Minang Di Kota Makassar.

Terdatanya sebanyak 25 Orang perantau Minang di Kota Makassar yang terdaftar sebagai anggota organisasi IKWAS, IKM Sapayuang, IKM Clarisa, IKM Songket, IKM Bordir dan Sulaman.

- Datar Pengurus Ormas Kabupaten /Kota Di Jakarta.

Terdatanya sebanyak 23 orang perantau Minang sebagai pengurus ormas Kabupaten/Kota di Jakarta, yang terdatar dalam organisasi IKM Sepayung Makasar, Persatuan Warna Sungayang POKDARWIS Kubu Gadang POKDARWIS Janjang Saribu KBKS Solok Saiyo Sakato Bakor Kota Solok Bakor 50 Kota KKTD IKPS Pulau Punjung DPP SAS IKASS Jaya BAKOR Payakumbuh 50

IKAWAS IKAKO AMAL DPP IKPS IKWAL /Lengayang  
KBKL Indo Jalito.

**2) Outcomes**

Tersedianya data organisasi dan perantau minang dari nagari/desa/kelurahan.

**3) Permasalahan dan Solusi**

Masih kurangnya kesadaran perantau untuk menyerahkan nama organisasi perantau minang yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia, sehingga data yang sudah terkumpul belum menyeluruh se-Indonesia. Untuk itu, sebagai solusinya, harus lebih giat lagi melakukan koordinasi baik di tingkat provinsi kabupaten/kota dan nagari/desa/kelurahan, serta membuat aplikasi untuk database perantau.

- c. Peningkatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang dengan anggaran Rp.185.162.590,- dan realisasi sebesar Rp.179.337.832,- (96%).

**1) Output**

Selama tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- Provinsi Lampung, Sabtu 17 Februari 2018 dalam rangka Pengukuhan Pengurus Gebu Minang Provinsi Lampung, hasil yang didapatkan :
  - Dikukuhkannya DPW GEBU Minang Lampung dengan Jumlah pengurus yang dikukuhkan berjumlah 34 orang pengurus harian, 13 Ketua Bidang, Sekretaris Bidang dan Bendahara.
  - Penandatanganan MoU antara Gebu Minang Provinsi Lampung bersama Perguruan Tinggi Umitra dan IBI Darmajaya untuk sektor pendidikan. Bantuan 100 beasiswa dari Umitra dan 100 beasiswa dari Darmajaya, yang diperuntukan untuk anak-anak minang di Provinsi Lampung.
- Provinsi Bali, Rabu 24 Februari 2018 acara dilaksanakan di Sekretariat IKM Bali dalam rangka Pengukuhan Pengurus IKMS Bali Periode 2018 – 2023.
  - Pengukuhan kepengurusan IKMS Bali periode 2018 – 2023 ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Nasrul Abit.

- Provinsi Banten, Minggu 22 Juli 2018 acara dilaksanakan di Hotel Mercure Serpong dalam rangka Silaturahmi dengan Perantau asal Dharmasraya.
  - Penandatanganan MoU antara Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung dengan IKPS dan IKADAMAS. MoU ditandatangani oleh Wali Nagari Nagari IV Koto Pulau Punjung dengan IKPS dan IKADAMAS dan disaksikan oleh Bupati Dharmasraya dan Ketua DPRD Dharmasraya.
- Provinsi Gorontalo, Sabtu 8 September 2018 acara dilaksanakan di Aula Kantor Perbendaharaan Negara Gorontalo dalam rangka Silaturahmi dengan Perantau Minang di Gorontalo.
  - Dalam rangka membangun jalinan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kerukunan Keluarga Minang Tuah Sakato (KKMTS) Provinsi Gorontalo mengundang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk hadir dalam acara silaturahmi yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2018 di Kota Gorontalo.
  - Kegiatan silaturahmi ini dapat mengoptimalkan dan mewujudkan sinergitas, peran aktif dan kontribusi perantau dalam percepatan pembangunan di Sumatera Barat, yang nantinya akan diwujudkan didalam komitmen kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan perantau minang di Provinsi Gorontalo.

## 2) Outcomes

Meningkatnya hubungan komunikasi antara pemerintah daerah provinsi dan kab/kota dengan perantau minang.

## 3) Permasalahan dan Solusi

Adapun didalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan yang berarti, karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sifatnya hanya memenuhi undangan dari ormas perantau yang melaksanakan kegiatan di suatu daerah. hanya saja tidak semua undangan dari ormas perantau ini dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia. Solusi dari permasalahan diatas adalah dengan penambahan anggaran untuk perjalanan dinas luar daerah, mengingat setiap disposisi pimpinan daerah pada undangan ormas perantau,

Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau akan selalu ditugaskan untuk mendampingi maupun mewakili pimpinan daerah sesuai dengan Tupoksi Biro dalam penyelenggaraan pembinaan jaringan komunikasi ranah dan rantau.

- d. Pembentukan dan Pembinaan Nagari/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau dengan anggaran Rp.349.888.368,- dan realisasi sebesar Rp.316.887.493,- (90%)

**1) Output**

Tersusunnya Dokumen masterplan pemberdayaan Potensi Nagari/Desa/Kelurahan dan pengembangan kawasan berbasis kreatif lokal di Nagari/Desa/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

**2) Outcome**

Terwujudnya 19 nagari/desa/kelurahan binaan Biro Kerjasama dan Rantau.

**3) Permasalahan dan Solusi**

Masih kurangnya partisipasi perantau dalam ikut serta melakukan pembinaan terhadap nagari Binaan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Untuk itu, solusinya adalah agar pejabat yang menangani rantau dengan camat dan wali nagari melakukan audensi dengan ormas untuk menyamakan persepsi tentang nagari binaan kerjasam rantau.

- e. Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah dengan anggaran Rp.351.677.425,- dan realisasi sebesar Rp.269.725.365,- (76%)

**1) Output**

Selama tahun 2018 secara umum berjalan dengan baik. Sedikitnya 31 Kerjasama telah dibahas sepanjang tahun ini. Hasilnya adalah 21 Kesepakatan Bersama (MoU) dan 33 Perjanjian Kerja Sama (PKs).

**2) Outcomes**

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kerjasama daerah.

**3) Permasalahan dan Solusi**

Kurangnya Sumber Daya Manusia yang akan mengelola kerjasama daerah. Untuk itu perlu adanya Penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) secara bertahap agar bisa mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama.

- f. Kerjasama Luar Negeri dengan anggaran Rp.142.497.400,- dan realisasi sebesar Rp.112.143.260,- (78%).

**1) Output**

Dalam tahun 2018 terdapat beberapa kerjasama luar negeri yang didapat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk *sister province* yang sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri RI melalui Pusat Fasilitas Kerja Sama, yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2019 antara lain:

- *Sister Province*
  - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dengan Jeollabuk – do (Korea Selatan) dalam bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia).
  - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Rep Tatarstan (Rusia) dalam bidang perdagangan, pariwisata dan renewable energy.
- Pihak Ketiga di Luar Negeri
  - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Unwell University (Birkenfeld - Jerman) bidang pendidikan dan renewable energy.
  - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Illonois University (Chicago – Amerika Serikat), bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk pertukaran tenaga pendidik.
  - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Deakin University (Melbourne – Australia) bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan dan pendidikan.
  - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Tsukuba of University (Tsukuba – Jepang), pada bidang penata kearsipan dan perbaikan arsip yang hancur pasca bencana.
  - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan International Buffalo Federation (Italia), pada bidang peternakan dengan pelatihan dan pendidikan tenaga peternak kerbau.
  - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan ENTS (Entaglement Technology Search) (Italia) dibidang penelitian sumber energy baru.



- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Anhui International Hui-Merchants Association (China), dibidang perindustrian dan teknologi baru.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Riza Farming (Brunei Darussalam) dibidang peternakan.

## **2) Outcomes**

Tercapainya program kerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka kerjasama dan implementasi kerjasama luar negeri.

## **3) Permasalahan dan Solusi**

Terbatasnya sumber daya manusia yang dapat mengelola hubungan kerjasama luar negeri. Untuk itu perlu adanya Penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) secara bertahap agar bisa mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama.

- g. Kerjasama Pihak Ketiga dengan anggaran Rp.148.158.000,- dengan realisasi sebesar Rp.133.520.208,- (90%).

## **1) Output**

Telah menghasilkan 7 (tujuh) Kesepakatan Bersama dan 14 (empat belas) Perjanjian Kerja Sama sedangkan dengan Kementerian/Lembaga Rapat-Rapat Fasilitasi dan Koordinasi tersebut telah menghasilkan 5 (lima) Kesepakatan Bersama dan 9 (sembilan) Perjanjian Kerja Sama. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- Kesepakatan Bersama Antara Yayasan Minangkabau World Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Kerjasama Sistem Manajemen Digital Halal Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat.
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Badan Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang Penelitian, Pengembangan, Dan Pemanfaatan Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Provinsi Sumatera Barat.
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Barat Dengan Pt. Semen Padang Dan Pt. Pertamina Tbbm Teluk Kabung Dan Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Dan Pt. Pertamina Dppu Bim Dan Pt. Lembah Karet

Dan Pt. Tidar Kerinci Agung Dan Pt. Mutiara Agam Dan Pt. Tirta Investama Dan Pt. Pn Vi Nusantara Danau Kembar Dan Pt. Sumbar Andalas Kencana Dan Pt. Mitra Kerinci Dan Pt. Pln Plta Maninjau Dan Pt. Bakrie Pasaman Plantation Dan Pt. Kencana Sawit Indonesia Dan Pt. Batang Hari Barisan Dan Pt. Pln Pauh Limo Dan Pt. Perkebunan Pelalu Raya Dan Pt. Pasaman Marama Sejahtera Dan Pt. Selago Makmur Plantation Dan Pt. Agrowiratama Dan Pt. Kilang Lima Gunung Dan Pt Pln Teluk Sirih Tentang Pelaksanaan Program Wanita Peduli Sampah Di Provinsi Sumatera Barat.

- Kesepakatan Bersama Antara Pt. Taspen (Persero) Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Kerjasama Penutupan Produk Pt. Asuransi Jiwa Taspen Bagi Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Sumatera Barat.
- Kesepakatan Bersama Antara Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia Cabang Padang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Kerjasama Sistem Penanggulangan Gawat Darurat (Spgd) Jantung Di Sumatera Barat.
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Kementerian Pariwisata Ri Tentang Percepatan Pengembangan Wisata Kuliner Dan Belanja Di Sumatera Barat.
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Universitas Baiturrahmah Tentang Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Senior Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Di Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
- Kesepakatan Bersama Antara Universitas Terbuka Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Provinsi Sumatera Barat.
- Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Kerja Sama Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri Di Provinsi Sumatera Barat.
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Ikatan Keluarga Minang (IKM) Sapayuang Sulselbar Tentang Peningkatan Kerjasama

Pemerintah Daerah Dengan Perantau Minang Di Bidang Sosial, Budaya Dan Ekonomi.

- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkmen Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tentang Kerjasama Dalam Bidang Kesehatan Dan Pengabdian Masyarakat Di Provinsi Sumatera Barat.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Yayasan Mercy Corps Indonesia Dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Program Technical Assistance And Training Teams (Tatts) Di Provinsi Sumatera Barat.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Dengan UPTD Persampahan DLH.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Dengan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tentang Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan PT. Asuransi Jiwa Taspen Tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kumpulan Taspen Save Untuk Aparatur Sipil Negera (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Solok Dengan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Padang Tentang Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Senior Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Di Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

- Perjanjian Kerja Sama Antara Biro Humas Setda Provinsi Sumbar Dengan Universitas Indonesia Tentang Workshop Pengembangan Keterampilan Kehumasan.
- Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Dengan Universitas Indonesia Tentang Diklat Training For Trainers.
- Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Dengan Universitas Indonesia Tentang Pelatihan Pengembangan Keterampilan Kepemimpinan.
- Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Tentang Workshop Peningkatan Kompetensi Guru.
- Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Tentang Bimbingan Teknis Public Speaking Dan Bimbingan Teknis Teknik Komunikasi.
- Perjanjian Kerjasama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Tentang Teknis Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian.
- Perjanjian Kerjasama Antara Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Barat Dengan Universitas Indonesia Tentang Workshop Bimbingan Konseling PNS.
- Perjanjian Kerjasama Antara Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Barat Dengan Universitas Indonesia Tentang Workshop Pengembangan Potensi Diri.
- Perjanjian Kerjasama Antara Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Barat Dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Tentang Workshop Penguatan Kerjasama Tim.
- Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Sarana Distribusi Dan Logistik Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu Tentang Peningkatan

Perdagangan Antar Pulau Dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.

- Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Sarana Distribusi Dan Logistik Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Peningkatan Perdagangan Antar Pulau Dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.
- Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Sarana Distribusi Dan Logistik Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Dengan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Gunungsitoli Tentang Peningkatan Perdagangan Antar Pulau Dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.
- Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Sarana Distribusi Dan Logistik Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tentang Peningkatan Perdagangan Antar Pulau Dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.

## **2) Outcomes**

Tercapainya program kerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam kerangka kerjasama dan implementasi kerjasama dengan pihak ketiga.

## **3) Permasalahan dan Solusi**

Sumber daya manusia yang belum tersedia secara memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Untuk itu perlu adanya Penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) secara bertahap agar bisa mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama.

- h. Kerjasama Antar Provinsi dengan anggaran Rp.90.555.870,- dengan realisasi sebesar Rp.78.828.402,- (87%)

## **1) Output**

Kerjasama yang ditawarkan meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang nantinya diharapkan akan ada tindaklanjut

yang dilakukan oleh Kepala OPD masing-masing sesuai kebutuhan. Adapun beberapa kerjasama antar provinsi sebagai berikut :

- Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Transmigrasi Antar Provinsi.
- Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tentang penyelenggaraan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi muara takung Kabupaten Sijunjung.
- Kerjasama Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tentang Distribusi dan ketersediaan Pangan (tindak lanjut MoU Prov Sumbar dengan Prov Kepri dan Kota Batam Tahun 2017)

## **2) Outcomes**

Meningkatnya hubungan kerjasama antar provinsi.

## **3) Permasalahan dan Solusi**

Terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola kerjasama antar provinsi. Untuk itu perlu adanya Penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) secara bertahap agar bisa mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama.

- i. Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.90.618.818,- dengan realisasi sebesar Rp.84.834.911,- (93%).

### **1) Output**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Kerjasama Antar Daerah untuk tahun 2018 khususnya kerjasama pemerintah provinsi dengan Kabupaten/kota dilaksanakan melalui antara lain :

- Fasilitasi kerjasama daerah berbatasan antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kota Payakumbuh.
- Fasilitasi kerjasama daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Agam Bukittingi, Lima Puluh Kota Payakumbuh serta Tanah Datar Padang Panjang terkait kerjasama system penyediaan air minum kawasan.
- Kesepakatan Bersama (MoU) Antara pemerintah Provinsi Barat dengan Pemko Padang tentang pelaksanaan Kegiatan rembug Madya KTNA 2018, 2019, dan 2020 dan

rembug utama kontak tani nelayan andalan (KTNA) nasional tahun 2010 serta Penas Petani Nelayan XVI Tahun 2020.

- Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tentang (kerjasama pembukaan kompetensi keahlian kriya kreatif batik dan tekstil pada SMK 1 Lintau Buo) pemanfaatan sentra industri tenun untuk pelaksanaan praktek siswa sekolah menengah kejuruan se-provinsi Sumatera Barat.
- Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tentang pelaksanaan Pekan olahraga Provinsi (PORPROV) VX Tahun 2018 di Kab. Padang Pariaman.
- Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kab. Pessel, Kab solok, Kab. Lima puluh kota, Kab Tanah Datar, Kab Sijunjung, Kab. Kep. Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto tentang pengembangan pembangunan destinasi pariwisata.
- Kesepakatan Bersama (MOU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/kota Se-Sumatera Barat tentang Perdagangan Komoditas Barang Kebutuhan Pokok Antar Kabupaten / kota Provinsi Sumatera Barat.

Kerjasama Pemerintah provinsi dengan Kabupaten/kota yang masih dalam proses pembahasan lebih lanjut, antara lain :

- Perjanjian Kerjasama antara dinas pariwisata provinsi dengan dinas pariwisata kabupaten/kota. Pelaksanaan kerjasama ini masih ditunda dan masih menunggu arahan lebih lanjut dari Bakeuda. Hal ini disebabkan daa BKK Tahun 2018 untuk kegiatan kepariwisataan (Destinasi pariwisata) terevaluasi oleh Kemendagri.
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Penerima Dan Pengelola Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Diwilayah Kerja South West Bukit Barisan. Pelaksanaan kerjasama ini tertunda karena permintaan



kabupaten sijunjung untuk dilakukan kajian ulang serta pembahasan oleh internal pemerintah kabupaten.

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten Sijunjung tentang Geopark Silokek Sijunjung. Pelaksanaan kerjasama ini tertunda karena dinas teknis di Provinsi (Dinas Pariwisata meminta supaya untuk MoU ini dilakukan global serta bersamaan dengan kabupaten kota lain yang berpotensi untuk kegiatan Geopark.
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Agam Bukittingi, Lima Puluh Kota Payakumbuh serta Tanah Datar Padang Panjang terkait kerjasama system penyediaan air minum kawasan. Pelaksanaan kerjasama ini tertunda karena masih menunggu fasilitasi dari Fasker Kemendagri. Hal ini disebabkan ikut terlibatnya kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pelaksanaan kerjasama ini. Sehingga perlu MoU antara kementerian dalam negeri dan Kementerian terkait, yang tindaklanjutnya dilaksanakan kerjasama oleh Provinsi dengan Kab/kota serta dengan Dirjen terkait di Kementerian PUPR.

## **2) Outcomes**

Meningkatnya hubungan kerjasama antara Provinsi dengan daerah kab/kota di Provinsi Sumatera Barat.

## **3) Permasalahan dan Solusi**

Terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola kerjasama pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Untuk itu perlu adanya Penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) secara bertahap agar bisa mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama.

- j. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian atau Lembaga dengan anggaran Rp.4.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.500.000,- (55,56%)

### **1) Output**

Menghasilkan 5 (lima) Kesepakatan Bersama dan 9 (sembilan) Perjanjian Kerja Sama. Pada tahun 2019, selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembuatan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang baru, akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat pada tahun 2018.



- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Badan Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang Penelitian, Pengembangan, Dan Pemanfaatan Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Provinsi Sumatera Barat.
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Kementerian Pariwisata RI Tentang Percepatan Pengembangan Wisata Kuliner Dan Belanja Di Sumatera Barat.
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Tentang Pengkajian, Penerapan Dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Kerja Sama Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri Di Provinsi Sumatera Barat.
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkmen Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tentang Kerjasama Dalam Bidang Kesehatan Dan Pengabdian Masyarakat Di Provinsi Sumatera Barat.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Dengan UPTD Persampahan DLH.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Dengan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tentang Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Sarana Distribusi Dan Logistik Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu Tentang Peningkatan Perdagangan Antar Pulau Dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.
- Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Sarana Distribusi Dan Logistik Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Peningkatan Perdagangan Antar Pulau Dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.
- Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Sarana Distribusi Dan Logistik Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Dengan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Gunungsitoli Tentang Peningkatan Perdagangan Antar Pulau Dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.
- Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Sarana Distribusi Dan Logistik Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tentang Peningkatan Perdagangan Antar Pulau Dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.
- Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Dengan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Tentang Penyusunan Dokumen Amdal Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandeh.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Dengan Laboratorium DNA Forensik Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Jakarta Tentang Penyelenggaraan Analisis Dna Untuk Perempuan Dan

Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Provinsi Sumatera Barat.

**2) Outcomes**

Meningkatnya hubungan kerjasama antar daerah dan Kementerian dan Lembaga.

**3) Permasalahan dan Solusi**

Masih kurangnya sumber daya manusia yang mengelola kerjasama pemerintah daerah dengan kementerian atau lembaga juga sangat minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan. Untuk itu perlu adanya Penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) secara bertahap agar bisa mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama.

- k. Monitoring Kerjasama Dalam dan Luar Negeri dengan Kementerian atau Lembaga dengan anggaran Rp.1.395.908.642,- dan realisasi sebesar Rp.1.374.175.359,- (98,44%).

**1) Output**

Beberapa kegiatan Monitoring Kerjasama Dalam dan Luar Negeri :

- Pelaksanaan penjajakan kerjasama ke Kota Chicago – Amerika Serikat pada tanggal 23 s.d 29 Maret 2018, dengan hasil :
  - Breakfast Meeting, Pemerintah Provinsi Sumbar juga melakukan paparan kegiatan *Business Opportunities in West Sumatera*.
  - Dalam hal ini Sumatera barat mempromosikan beberapa potensi dan peluang investasi untuk sektor renewable energy, micro hydro powerplant, fishery, mining, transportation, industry dan sites for center industry yang masih terbuka untuk ruang investasi dan kerjasama.
  - Dalam Hasil Kegiatan dimaksud Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang didampingi oleh KJRI untuk Chicago mendapatkan tawaran dari pengusaha dan Kadin Illinois – Chicago guna menerima rendang untuk dipasarkan di kawasan Amerika Serikat serta tawaran kerjasama dengan Illinois University dalam bentuk pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah.
  - Final meeting persiapan loi sister province dan melihat potensi yang akan di kerjasamakan pada tanggal 22 s.d

27 Maret 2018 di kota jeonju provinsi jeollabuk-do, Korea Selatan, dengan hasil :

- Kesepakatan terhadap materi dan ruang lingkup yang akan di kerjasama pada rencana *sister province* Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jeollabuk-do adalah pendidikan, pariwisata, kesehatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
  - Akan dilaksanakan kajian mengenai pelaksanaan *Sister Province* baik dari pihak Provinsi Sumatera Barat maupun Provinsi Jeollabuk-do, sehingga dalam penyusunan *Action Plan* dapat terlaksana dengan baik.
- Menghadiri *the 2<sup>nd</sup> indonesia week* di nagoya, jepang dan temu bisnis dengan pengusaha di jepang pada tanggal 26 april s.d 1 Mei 2018, dengan hasil :
- Diharapkan ekspor ikan tuna di Sumatera Barat meningkat serta investor yang berada di Jepang dapat menanamkan sahamnya ke wilayah di Sumatera Barat.
  - Diharapkan aparaturnya Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat dapat belajar bagaimana wilayah Jepang meningkatkan wilayah sektor pariwisata, kebudayaan dan perikanan.
  - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendapatkan pembelajaran terkait pengembangan kawasan 1000 rumah gadang melalui Desa Shirakawa-go.
  - Pemerintah Kabupaten Agam mendapatkan penawaran kerjasama oleh perusahaan di jepang terkait pengembangan Air Danau sebagai Sumber Tenaga Listrik untuk dilakukan di Danau Maninjau.
- Menghadiri rangkaian kegiatan *fez-meknes economic forum (fmef)*, misi investasi dan pendalaman kerjasama dengan pemerintah provinsi fez- meknes pada tanggal 27 Juni – 1 Juli 2018, dengan hasil :
- Kegiatan ini dimaksud juga bertujuan menindaklanjuti kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Fez-Meknes, Maroko yang sudah terjalin sejak tahun 2014 tentang perdagangan, dimana menghasilkan transaksi antara pengusaha dari Sumatera Barat dengan Fez-Meknes dalam ekspor impor rempah dan kopi.

- Selanjutnya, keinginan Pemerintah Fez-Meknes akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota di lain di Provinsi Sumatera Barat seperti, Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang dalam bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan.
- Menghadiri kegiatan festival indonesia (fi-3) tanggal 1 sd 7 Agustus 2018 di Moscow, Russia, dengan hasil :
  - Tawaran dari Provinsi Kazan – Rusia dalam bentuk kerjasama dengan pengembangan kereta api di Sumatera Barat sebagai hasil dari *Bussines Forum* yang dilaksanakan oleh panitia Festival Indonesia ke -3.
- Menghadiri undangan resepsi diplomatik, pameran indonesia dan *bussines meeting* dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke 73 proklamasi kemerdekaan ri di brunei darussalam pada tanggal 31 Agustus s.d 4 September 2018, dengan hasil :
  - Keinginan Ikatan Keluarga Minang yang berada di Brunei Darussalam membuka jalur bisnis ke Indonesia terutama Sumatera Barat.
  - Selanjutnya, rencana kerjasama dengan Riza Farming perusahaan yang bergerak dibidang peternakan ayam, yang sangat ingin memberikan ilmu mengenai pengembangan ayam ditambah lagi dengan keterbatasan lahan di Brunei Darussalam dan tingginya permintaan Ayam poong di Brunei Darussalam, pihak Riza Farming ini mengembangkan perusahaannya ke Indonesia terutama Sumatera Barat.
- Mengikuti kegiatan *15<sup>th</sup> china asean expo (caexpo)* 2018 tanggal 12 s.d 15 September 2018 di nanning, Provinsi Guangxi, Republik Rakyat Tiongkok, dengan hasil :
  - Hasil *business meeting* yang diminati oleh investor potensial China terkait sektor pariwisata, renewable energy diantaranya; Mr. Guo Wandong, perusahaan Anhui International Hui-Merchants Association yang berminat di *renewable energy* untuk pembangunan di pembangkit listrik tenaga surya. Sedangkan untuk sektor pariwisata diminati oleh Charrys Utasa, perusahaan yang bergerak di sektor wisata bahari.
  - Adanya investor dari China yang sangat ingin mengembangkan kawasan wisata Lembah Anai –

Kabupaten Padang Pariaman dengan memberikan desain dan konsep pengembangan kawasan wisata lembah anak, dimana investor tersebut melihat Pariwisata Sumatera Barat melalui Website.

- Menghadiri kegiatan *indonesia-australia business summit* (iabs) 2018, penandatanganan mou antara *deakin university* dengan pemerintah provinsi sumatera barat dan minang diaspora network - *global summit and minangkabau festival 2018*, dengan hasil :
  - Rencana kerjasama dalam Forum Indonesia Australia Business Summit (IABS) 2018 antara lain :
    - Adrian Kennedy direktur Hiddensouk Australia, tentang kebutuhan tenaga kerja dibidang industri untuk tenaga montir, dan perawat di Australia, khusus perawat diperlukan kualifikasi kemampuan Bahasa inggris, karena kebutuhan komunikasi dengan pasien.
    - Tony Mitchener, membutuhkan rempah-rempah terutama jahe merah. Dimana pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menindaklanjuti dengan menghubungkan pengusaha Australia dengan penyedia rempah di Sumatera Barat.
    - Mr. Peter Craven dari Katama Global Australia dalam Forum Indonesia Australia Business Summit (IABS) 2018, Mereka mengemukakan ketertarikan terhadap investasi dibidang energi, pada kesempatan itu juga mendiskusikan kebutuhan energi dan peluang pengembangan untuk ketersediaan listrik baik skala besar hingga kecil.
  - Penandatanganan Lol (Letter of Intent) oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat dan Prof. Katya Jonshon guru besar untuk Deakin University untuk rencana kerjasama dalam bidang akademis, pelatihan dan pertukaran tenaga pengajar guna meningkatkan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang juga disaksikan oleh Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama, Kementerian Dalam Negeri, Kepala OPD terkait.
  - Kemudian dalam Kegiat MDN Festival Global Minangkabau Summit 2018, seluruh ikatan keluarga minang seluruh dunia bersedia melakukan kerjasama

untuk mensukseskan kegiatan pulang basamo se dunia tahun 2020.

- Kegiatan promosi peluang investasi di Sumatera Barat serta pagelaran seni budaya dan pameran eurochocolate di Italia dan Malta pada tanggal 18 s.d 24 Oktober 2018, dengan hasil :
  - Delegasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Dubes RI untuk Roma menghadiri temu bisnis Konfederasi Industri Italia di Confidustria yang menghasilkan minat Investasi dan perdagangan yang meliputi Agroindustri yang diantaranya kopi, coklat, rempah dll.
  - Dalam paparan tersebut disektor Pariwisata di ekspose tentang peluang investasi di Kepulauan Mentawai, Gunung Padang, Mandeh dan Potensi energi terbarukan, geothermal dan hydro energi di Sumatera Barat.
  - Delegasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadiri Temu Bisnis pada Festival Eurochocolate. Pada kegiatan Temu Bisnis ini Gubernur Sumatera Barat sebagai special guest menyampaikan paparan tentang potensi dan prospek coklat di Sumatera Barat. Pada kegiatan ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga membawa beberapa produk dan hasil perkebunan di Sumatera Barat seperti coklat dari Kabupaten padang pariaman dan kopi dari Kabupaten Agam. Selain itu Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat juga membawa beberapa sampel buah kakao yang ditanam di Sumatera Barat.
  - Penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dengan International Buffalo Federation, Italia yang memuat berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat, yang diantaranya kerjasama pertukaran informasi dan aktifitas terkait penelitian dan pengembangan peternakan, peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM, dan kerjasama lainnya
- Menghadiri dan mendampingi Sekretaris Daerah Kota Padang dalam rangka melakukan penjajakan kerjasama dan study tiru pertukaran informasi mengenai penataan



kearsipan pasca bencana alam, penganggulan bencana dan pengelolaan air bersih ke Jepang pada tanggal 26 November s.d 2 Desember 2018, dengan hasil:

- Pemerintah Prefektur Ibaraki bersedia melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bidang pengelolaan sampah dan energi terbarukan.
- Kegiatan pameran dagang l'artigiano in fiera 2018 di Milan Italia dan Malta pada tanggal 3 s.d 9 Desember 2018, dengan hasil :
  - Pertunjukan seni dan Budaya Sumatera Barat ditampilkan 5 kali setiap harinya dan selalu ramai ditonton pengunjung pameran L'Artigiano in Fiera, Milan yang berskala internasional, penampilan ini diminati hingga juga mendapat apresiasi direktur pameran dan koordinator pameran wilayah Asia.
  - Penjajakan tentang kerjasama energi terbarukan bersama perusahaan ENTS (Entanglement Technology Search). Topografi Sumatera Barat yang relatif agak mirip dengan Trento Italia, yaitu berbukit-bukit, berpegunungan, serta banyaknya sumberdaya air dan angin, membuat ENTS tertarik untuk menjajaki kerjasama dengan Sumatera Barat. Selain itu, juga pengolahan limbah sampah yang dapat diolah menjadi energi baru dan terbarukan.

## **2) Outcomes**

Tercapainya program kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka kerjasama dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri.

## **3) Permasalahan dan Solusi**

Kurangnya sumber daya manusia yang membantu dalam memfasilitasi kegiatan. Untuk itu perlu adanya Penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) secara bertahap agar bisa mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama.

## **B. Penegasan Batas Wilayah**

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis diperlukan pelaksanaan penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan, maka perlu dilakukan penegasan batas daerah secara sistematis dan terkoordinasi, sesuai dengan Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

## **1. Program dan Kegiatan**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan fasilitasi penegasan batas wilayah baik itu batas antar Provinsi dan batas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat melalui Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan penegasan batas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan kegiatan Penegasan Batas Daerah Prov. Sumbar Dengan Prov. Tetangga.

## **2. Realisasi Program dan Kegiatan**

Untuk kegiatan penegasan batas daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2018, terakomodir dalam Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penegasan Batas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan anggaran sebesar Rp.320.334.000,- dan realisasi sebesar Rp.284.017.918,- (88%)

### **1) Output**

Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 Kabupaten/Kota, terbagi menjadi 32 segmen batas Kabupaten/Kota. Dari 32 segmen tersebut telah selesai penegasan batas dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Sebanyak 17 Segmen Batas Kabupaten/Kota, dan menyisakan 15 Segmen Batas dengan perincian sebagai berikut :

- Segmen batas yang sudah selesai (17 Segmen)
  - Kab. Solok dengan Kota Padang
  - Kab. Solok dengan Kota Sawahlunto
  - Kab. Solok dengan Kota Solok
  - Kab. Solok dengan Kab. Padang Pariaman
  - Kab. Solok dengan Kab. Solok Selatan
  - Kab. Solok dengan Kab. Pesisir Selatan
  - Kota Solok dengan Kota Padang
  - Kab. 50 Kota dengan Kab. Agam
  - Kab. 50 Kota dengan Kab. Tanah Datar
  - Kab. 50 Kota dengan Kab. Sijunjung
  - Kab. 50 Kota dengan Kab. Pasaman

- Kab. Agam dengan Kab. Pasaman
- Kab. Agam dengan Kab. Pasaman Barat
- Kab. Agam dengan Kab. Padang Pariaman
- Kab. Tanah Datar dengan Kota Sawahlunto
- Kab. Pessel dengan Kab. Solok Selatan
- Kab. Pesisir Selatan dengan Kota Padang
- Proses Penerbitan Permendagri Batas (3 Segmen)
  - Kab. Padang Pariaman dengan Kota Padang
  - Kab. Sijunjung dengan Kab. Dharmasraya
  - Kab. Solok dengan Kab. Dharmasraya
- Proses Tahapan Finalisasi oleh Kementerian (3 segmen)
  - Kab. Tanah Datar dengan Kab. Agam
  - Kab. Tanah Datar dengan Kota Padang Panjang
  - Kab.50 Kota dengan Kota Payakumbuh
- Proses Tahapan Finalisasi oleh Provinsi (4 Segmen)
  - Kab. Padang Pariaman dengan Kota Pariaman
  - Kab. Dharmasraya dengan Kab. Solok Selatan
  - Kab. Sijunjung dengan Kota Sawahlunto
  - Kab. Pasaman dengan Kab. Pasaman Barat
- Pelaksanaan Tahun 2019 (2 Segmen)
  - Kab. Sijunjung dengan Kab. Solok
  - Kab. Tanah Datar dengan Kab. Solok
- Pelaksanaan Tahun 2020 (3 Segmen)
  - Kab. Tanah Datar dengan Kab. Sijunjung
  - Kab. Tanah Datar dengan Kab. Padang Pariaman
  - Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi

## 2) Outcomes

Terwujudnya kepastian hukum pada Wilayah Administratif Pemerintahan khususnya di wilayah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

## 3) Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
  - Masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat tentang perlunya penegakan batas wilayah.

- Kurangnya SDM Aparatur yang mengerti Substansi dan Mekanisme Kegiatan Penegasan Batas.
- Solusi
  - Perlu diadakannya sosialisasi terhadap aparaturnya dan masyarakat, tentang Proses Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah.
  - Perlu Pembinaan dan Bimbingan Tekhnis terkait Substansi dan Mekanisme Kegiatan Penegasan Batas bagi aparaturnya pemerintah.
- b. Penegasan Batas Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga dengan anggaran sebesar Rp.88.652.600,- dan realisasi sebesar Rp.83.385.000,- (94%)

### 1) Output

Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 4 Segmen Batas Provinsi dan terbagi menjadi 13 sub segmen batas. pada Tahun 2018 ini, telah selesai seluruh kegiatan penegasan batas terhadap 4 segmen dan 13 sub segmen batas antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi tetangga tersebut dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, dengan perincian sebagai berikut :

- Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau (Permendagri Nomor 44 Tahun 2013).
  - Kab.50 Kota-Kab. Kampar
  - Kab.Sijunjung-Kab. Kuantan Singingi
  - Kab.Dharmasraya-Kab.Kuantan Singingi
  - Kab. Pasaman-Kab.Rokan Hulu
  - Kab. Sijunjung-Kab. Kampar
- Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu (Permendagri Nomor 87 Tahun 2017)
  - Kab. Pessel dengan Kab.Mukomuko
- Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara (Permendagri 53,54,55 Tahun 2018)
  - Kab. Pasaman -Kab.Mandailing Natal
  - Kab. Pasaman-Kab.Padang Lawas
  - Kab. Pasaman Barat-Kab. Mandailing Natal
- Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi (Permendagri 70,71,72,73 Tahun 2018 )
  - Kab. Dharmasraya-Tebo

- Kab. Pesisir Selatan-Kota Sungai Penuh-Kab.Kerinci
- Kab. Solok Selatan-Kab. Kerinci
- Kab. Dharmasraya-Kab. Bungo

## **2) Outcome**

Terwujudnya kepastian hukum pada Wilayah Administratif Pemerintahan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi tetangga.

## **3) Permasalahan dan Solusi**

Dengan telah ditegaskannya 4 segmen batas Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi tetangga, maka disimpulkan kegiatan penegasan batas antar Provinsi telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kegiatan ini bisa ditindaklanjuti dengan sosialisasi terhadap Permendagri tersebut kepada masyarakat yang berada di wilayah perbatasan yang mayoritas belum mengetahui tentang terbitnya Permendagri yang akan mengatur administrasi kewilayahan pada wilayah mereka. Untuk itu diperlukan kegiatan sosialisasi yang harus didukung dengan anggaran yang memadai.

## **C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah**

### **1. Program dan Kegiatan**

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018 berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam melaksanakan beberapa program antara lain :

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp.1.705.410.460,- dengan realisasi sebesar Rp.1.601.379.857,-
- b. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dengan anggaran sebesar Rp.523.883.500,- dan realisasi sebesar Rp.489.168.526,-

### **2. Realisasi Program dan Kegiatan**

Adapun Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang terbagi atas beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan yang tertuang di DPA Badan Kesbangpol Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Monitoring Penanganan Masalah Strategis Daerah dengan anggaran sebesar Rp.550.280.000,- dengan realisasi Rp.532.455.045,- (96,76%).

**1) Output**

- Pelaksanaan Rapat Forkopimda (13 Februari 2018)

Adapun hasil dari pelaksanaan rapat tersebut diantaranya:

- Secara umum dengan telah berjalannya proses dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 kondisi di Sumatera Barat sejauh ini relatif kondusif.
- Sinergitas TNI Polri sangat dibutuhkan dalam mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang setiap waktu dapat terjadi selama proses dan tahapan Pilkada serentak ini berjalan.
- Terkait upaya pengamanan pilkada serentak di Sumatera Barat, pihak TNI Polri telah menyiapkan personel serta anggaran operasional, diharapkan secara optimal dapat membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan selama Pilkada serentak berlangsung.

- Pelaksanaan Rapat Forkopimda (24 April 2018)

Rapat dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti meningkatnya polemik dan penolakan masyarakat Nagari Batu Bajaranjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di daerah tersebut. Terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari rapat koordinasi tersebut diantaranya :

- Dalam menyelesaikan permasalahan ini diharapkan sinergitas antar lembaga dan pemangku kepentingan tetap terjaga dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat setempat.
- Sebagai upaya percepatan pelaksanaan proyek ini, pihak PT Hitay Daya Energi meminta fasilitasi pengamanan untuk pengambilan sampel *soil* yang akan di uji selama 2 hari.

- Pelaksanaan Rapat Forkopimda (9 November 2018)

Rapat dilaksanakan berkaitan dengan terhambatnya pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru terutama pada ruas I Padang-Sicincin.

Terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari rapat koordinasi yang melibatkan Tim Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait diantaranya :

- Upaya deskresi oleh Presiden RI dinilai salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan ganti rugi tanah masyarakat, sehingga diharapkan akan muncul keputusan presiden untuk melakukan peninjauan ulang terhadap besaran ganti rugi tanah masyarakat, maka proyek strategis nasional ini dapat segera terlaksana.
- Proses konsinyasi di pengadilan sebaiknya dilakukan setelah tahun politik ini berakhir, dan ini menjadi solusi kita dalam proses ganti rugi tanah masyarakat
- Permasalahan tanah masyarakat yang akan diganti rugi namun status kepemilikan tanah yang masih bersengketa, dapat diselesaikan segera oleh Pemkab. Padang Pariaman bekerjasama dengan Kanwil ATR/BPN Sumbar dan Pengadilan.
- Diharapkan Pemkab. Padang Pariaman dapat memaksimalkan sosialisasi-sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat dalam upaya pembebasan lahan.
- Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi untuk mendapatkan informasi dalam melengkapi bahan pendukung dan merumuskan penjelasan tertulis terkait surat Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang Nomor : 61/SK-E/LBH-PDG/IV/2018 7 Mei 2018.

Terdapat beberapa hasil dan kesimpulan diantaranya :

- Pemerintah Kabupaten Solok menemui titik buntu dalam menyelesaikan permasalahan penolakan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (Geothermal) di Nagari Batu Bajanjang dan berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Forkopimda Sumatera Barat dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Operasi penggalangan masyarakat merupakan salah satu solusi untuk meyakinkan dan menyadarkan masyarakat bahwa mereka telah terprovokasi oleh oknum-oknum yang punya kepentingan dibalik itu.
- Rapat Koordinasi Pengaduan Masyarakat (6 Agustus 2018).

Dilaksanakannya rapat dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat kepada Presiden RI dari Sdr. Perdianto Lubis, SH, MH (kuasa hukum Drs. Suardi Rasyid, dkk) untuk penyelesaian kasus plasma sawit antara Drs. Suardi Rasyid dkk pemilik 33 persil sertifikat kebun kelapa sawit SHM nomor 539 s/d 571 seluas 66 ha di Nagari Sasak Kecamatan Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dengan perusahaan Wilmar International Limited. Dipandang perlu melakukan rapat kordinasi guna mengevaluasi dan langkah-langkah antisipatif. Maksud dari dilaksanakannya rapat ini adalah untuk menyamakan persepsi dan penghimpunan informasi serta data sementara sehubungan dengan rencana kunjungan kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretaris Negara pada tanggal 8 Agustus 2018 terkait tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat tersebut ke Provinsi Sumatera Barat.

- Rapat Koordinasi Pengaduan Masyarakat bersama Tim KEMENSESNEG RI (8 Agustus 2018).

Maksud dari dilaksanakannya rapat ini adalah agar terciptanya koordinasi dan klarifikasi antara Tim Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kemensesneg RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden RI terkait penyelesaian kasus plasma sawit antara Drs. Suardi Rasyid dkk pemilik 33 persil sertifikat kebun kelapa sawit SHM nomor 539 s/d 571 seluas 66 ha di Nagari Sasak Kecamatan Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat dengan perusahaan Wilmar International Limited. yang telah diteruskan kepada Gubernur Sumatera Barat.

## **2) Outcomes**

Terjalannya koordinasi dengan Forkopimda dinas/instansi terkait dalam penanganan masalah strategis daerah

## **3) Permasalahan dan Solusi**

Belum maksimalnya sinergitas antar anggota Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dalam menjawab permasalahan menyangkut peningkatan keamanan dan kenyamanan. Untuk itu perlu lebih lanjut mengintensifkan pertemuan dan koordinasi dalam mengidentifikasi permasalahan yang

terjadi dan mencari solusi dan pemecahan permasalahan yang lebih optimal.

- b. Monitoring Pemantauan Orang Asing dengan anggaran sebesar Rp.122.954.300,- dan realisasi sebesar Rp.103.058.800,- (83,82%)

**1) Output**

Output dari kegiatan ini berupa pelaksanaan koordinasi dengan Non-Governmental Organizations (NGO) dan instansi terkait dalam pemantauan orang asing di daerah. Ruang lingkup pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing yaitu diplomat/tamu VIP asing, tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing, wartawan dan shooting film asing, peneliti asing, artis asing, rohaniwan asing dan ormas asing. Terkait dengan hasil pengawasan aktivitas orang asing di lapangan, Badan Kesbangpol Provinsi melaksanakan beberapa kali rapat tim Pengawasan Orang Asing (POA), dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

- Pelaksanaan Rapat POA (16 Maret 2018)

Rapat koordinasi dilakukan terkait dengan permasalahan viralnya video pengusiran rombongan anggota DPRD Sumatera Barat dalam kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh oknum WNA.

- Pelaksanaan Rapat POA (6 Juli 2018).

Rapat koordinasi dilakukan terkait aktivitas orang asing di Sumatera Barat terutama yang akan melakukan aktivitas penelitian dan permasalahan sinkonisasi data antar instansi/stakeholder dalam pemantauan orang asing.

- Pelaksanaan Rapat POA (28 September 2018)

Rapat koordinasi dilakukan terkait aktivitas orang asing di Sumatera Barat terutama yang akan melakukan aktivitas berwisata dan berinfestasi dibidang pariwisata, sehingga perlu adanya koordinasi antar instansi/stakeholder dalam pemantauan orang asing guna mengevaluasi dan langkah-langkah antisipatif.

- Pelaksanaan Rapat POA (31 Oktober 2018).

Rapat koordinasi dilakukan terkait kedatangan Dato Seri Anwar Ibrahim dalam rangka menerima gelar DR (HC) dari Universitas Negeri Padang di Padang, sehingga perlu adanya koordinasi antar instansi/stakeholder dalam



pemantauan orang asing guna mengevaluasi dan langkah-langkah antisipatif.

- Pelaksanaan Rapat POA (20 Desember 2018).

Rapat koordinasi dilakukan terkait aktivitas orang asing di Sumatera Barat terutama terkait informasi dan peristiwa yang baru terjadi terkait aktivitas pekerja asing yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang diduga beraktivitas dikawasan tambang bekas penajahan Belanda. Kemudian terkait adanya informasi WNA di daerah Kabupaten Agam hingga saat ini masih dalam pendalaman dan diduga mereka pindah-pindah.

## **2) Outcomes**

Meningkatnya koordinasi dalam pemantuan orang asing di daerah.

## **3) Permasalahan dan Solusi**

Belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas antar instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Sumatera Barat dalam menjawab permasalahan terkait aktivitas orang asing di Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu perlu memaksimalkan fungsi satgas dalam wadah intelijen yang dapat melakukan monitoring dan penindakan dilapangan terhadap aktivitas dan prosedur administrasi orang asing yang melanggar aturan yang berlaku atau indikasi-indikasi/misi tertentu orang asing yang masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Barat.

- c. Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar Rp.265.485.600,- dan realisasi sebesar Rp.245.549.770,- (93,55%)

## **1) Output**

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya rencana aksi penanganan konflik sosial. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

- Provinsi Sumatera Barat di tahun 2018 memiliki 17 Rencana Aksi, yaitu :

- Peningkatan Nilai-nilai bela negara dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI).
- Pemantapan Nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI).
- Peningkatan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa dalam rangka revolusi mental pelajar sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI).
- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat leading sektor Kejati Sumbar.
- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- Peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI).
- Percepatan Penetapan Batas Daerah Administrasi Provinsi dan Kab/Kota.
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenaga Kerjaan.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan.
- Pengoptimalan kegiatan pencegahan aksi terorisme (RA: 10).
- Konflik Sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme.
- Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang Lahan/SDA, periode mulai tahun 2017.
- Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang Lahan/SDA, periode mulai tahun 2018.
- Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang ekonomi/ industrial periode mulai tahun 2018.
- Pelaksanaan Pemulihan Pasca Konflik/Bencana Sosial.
- Terlaksananya Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2018.

- Pelaporan Kasus Konflik Sosial setiap bulannya.
- Berdasarkan pelaporan dan penginputan data dukung ke portal pelaporan timdu di **Error! Hyperlink reference not valid.** dan setelah dievaluasi oleh tim Kemendagri RI, terdapat 4 rencana aksi yang belum memenuhi target, 4 rencana aksi mendekati target, sebanyak 7 rencana aksi sesuai target dan 1 rencana aksi yang melebihi target, antara lain :
  - rencana aksi yg belum memenuhi target yaitu :
    - Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
    - Peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI).
    - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenaga Kerjaan.
    - Pelaksanaan Pemulihan Pasca Konflik / Bencana Sosial.
  - 4 rencana aksi mendekati target yaitu :
    - Peningkatan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa dalam rangka revolusi mental pelajar sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI).
    - Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Pengoptimalan kegiatan pencegahan aksi terorisme.
    - Pelaporan Kasus Konflik Sosial setiap bulannya.
  - 7 rencana aksi sesuai target.
    - Peningkatan Nilai-nilai bela negara dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI).
    - Pemantapan Nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI).
    - Percepatan Penetapan Batas Daerah Administrasi Provinsi dan Kab/Kota (RA: 07).

- Penghentian Konflik Sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme.
- Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang Lahan/SDA, periode mulai tahun 2017.
- Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang Lahan/SDA, periode mulai tahun 2018.
- Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang ekonomi/ industrial periode mulai tahun 2018.
- 1 rencana aksi yang melebihi target yaitu :
  - Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan. (RA: 09).
- Berdasarkan capaian pelaporan tersebut Provinsi Sumatera Barat meraih ranking 15 se-Indonesia dengan nilai capaian 61,94%.

## 2) Outcome

Terlaksananya rencana aksi penanganan konflik social.

## 3) Permasalahan dan Solusi

- Terdapat beberapa instansi yang belum melaksanakan kegiatannya di periode pelaporan ini.
- Terdapat data dukung yang tidak tepat sasaran yang disampaikan oleh beberapa OPD/instansi.
- Jadwal pembukaan portal pelaporan yang terlalu pendek, berakibat upload pelaporan ke portal tidak berjalan maksimal.
- Terdapat beberapa OPD/instansi yang mengalami pergeseran jadwal kegiatan, sehingga untuk pelaporan rencana aksi pada periode B08 menjadi nihil.
- Terjadinya pergeseran/mutasi personel penanggungjawab pelaporan rencana aksi pada beberapa instansi/OPD, sehingga tidak maksimalnya pelaporan RA terpadu penanganan konflik intansi/OPD tersebut.
- Terkait beberapa hal tersebut di atas, maka perlu meningkatkan sinergitas terutama anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik yang berada pada level pengambil kebijakan, sehingga terdapat langkah-langkah strategis dalam meningkatkan nilai capaian pelaporan rencana aksi tim terpadu dimaksud di tingkat nasional serta perlu melakukan Rakorda dan Rakornis yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan teknis penyusunan Rencana

Aksi dan penyusunan data dukung dan pelaporan rencana aksi bagi instansi/OPD yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

- d. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan realisasi Rp.48.952.800,- (97,91%).

**1) Output**

Melalui upaya deteksi dan cegah dini, yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota terkait ditemukannya potensi dan indikasi paham radikalisme di daerah. Mencari masukan dan kondisi diwilayah masing-masing berupa Pulbaket, Matbar dan monitoring. Selain itu juga mendorong Kesbangpol Kabupten/Kota untuk melakukan kegiatan sosialisasi, advokasi dan upaya peningkatan pemahaman lainnya terhadap masyarakat terutama generasi muda terhadap paparan dan pengaruh buruk radikalisme, sebab radikalisme merupakan benih awal untuk terjadinya aksi terorisme.

**2) Outcome**

Terwujudnya upaya pecegahan terorisme di daerah.

**3) Permasalahan dan Solusi**

Belum maksimalnya upaya deteksi dan cegah dini terhadap paham radikalisme ditengah masyarakat. Untuk itu perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur intelijen di Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Kasbangpol di tingkat Kabupaten/Kota baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga upaya deteksi dan cegah dini terhadap paparan radikalisme dapat segera dideteksi dan dilakukan upaya antisipatif secara cepat.

- e. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar Rp.62.324.300,- dan realisasi sebesar Rp.58.707.187,- (94,19%).

**1) Output**

Output dari kegiatan ini adalah terjalinnya koordinasi dengan intansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam pencegahan konflik sosial. Konflik Sosial dipicu oleh berbagai hal diantaranya perbedaan persepsi masalah politik, kesenjangan ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan, SARA dan isu lainnya. Dengan semakin tingginya tensi konflik yang terjadi saat ini, perlu adanya langkah – langkah kongkrit untuk meminimalisir meluasnya konflik tersebut. Oleh karena

itu salah satu upaya yang sangat penting untuk dilakukan adalah pemetaan konflik sosial. Adapun Hasil Evaluasi Pemetaan Potensi Konflik Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- Potensi Konflik Ekopolsosbud.

Secara kuantitas potensi konflik ini cukup mendominasi terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Kecenderungan terjadi pada daerah yang memiliki tingkat keheterogenan dan kemajemukan masyarakat yang tinggi seperti daerah dengan masyarakat pendatangnya lebih banyak dari jumlah penduduk aslinya. Daerah yang menonjol memiliki potensi konflik bidang ekopolsosbud ini selama tahun 2018 diantaranya (urutan 5 besar berdasarkan jumlah terbesar potensi konflik yang dimiliki):

- Kabupaten Tanah Datar
- Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Kota Sawahlunto
- Kota Bukittinggi
- Kabupaten Pasaman Barat.

- Potensi Konflik SDA/Lahan

Permasalahan SDA/lahan masih menjadi permasalahan utama potensi konflik terjadi di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2018. Potensi konflik terjadi lebih disebabkan permasalahan status kepemilikan lahan, kontribusi/bagi hasil perkebunan/pertambangan, dan permasalahan dampak lingkungan lainnya akibat pengelolaan SDA. Daerah yang menonjol memiliki potensi konflik SDA/lahan ini selama tahun 2018 diantaranya (urutan 5 besar berdasarkan jumlah terbesar potensi konflik yang dimiliki):

- Kabupaten Pasaman Barat.
- Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kabupaten Solok Selatan.
- Kabupaten Solok.
- Kabupaten Padang Pariaman.

- Potensi Konflik Distribusi SDA

Permasalahan distribusi SDA erat kaitan dengan sumber-sumber daya alam yang dikelola namun belum

memberikan kontribusi dan manfaat terutama kepada masyarakat sekitar SDA tersebut. Hal tersebut merupakan pemasalahan utama yang kerap memicu potensi konflik distribusi SDA yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera Barat. Daerah yang menonjol memiliki potensi konflik distribusi SDA selama tahun 2018 diantaranya (urutan berdasarkan jumlah terbesar potensi konflik yang dimiliki):

- Kabupaten Agam
- Kabupaten Solok
- Kabupaten Pasaman Barat

- Potensi Konflik Batas Wilayah

Munculnya potensi konflik batas wilayah di Sumatera Barat cenderung disebabkan adanya potensi SDA atau objek bernilai ekonomi berada diantara dua daerah yang memiliki perbatasan (antar nagari, kecamatan atau kabupaten). Penyelesaian permasalahan batas wilayah antar nagari ataupun kecamatan dapat diselesaikan ditingkat kabupaten/kota atau menjadi kewenangannya pemerintah kabupaten/kota. Penyelesaian permasalahan batas wilayah antar kabupaten/kota menjadi kewenangannya pemerintah provinsi. Adapun daerah yang menonjol memiliki potensi konflik batas wilayah selama tahun 2018 diantaranya (urutan berdasarkan jumlah terbesar potensi konflik yang dimiliki):

- Kabupaten Tanah Datar
- Kabupaten Solok
- Kabupaten Solok Selatan
- Kota Sawahlunto
- Kabupaten Sijunjung

- Potensi Konflik Sara

Beragam motif yang menjadi penyebab munculnya permasalahan SARA di Sumatera Barat selama tahun 2018, diantaranya izin pembangunan rumah ibadah, aktivitas penganut aliran sesat, dan larangan pelaksanaan ibadah. Permasalahan SARA dinilai sangat sensitif dan rentan untuk pecah menjadi konflik komunal bila tidak segera dilakukan upaya deteksi dan cegah dini. Langkah antisipasi dapat dilakukan dengan menemukan segera solusi pemecahan masalahnya melalui pendekatan *win-*

*win solution*. Adapun daerah yang menonjol memiliki potensi konflik SARA selama tahun 2018 diantaranya (urutan berdasarkan jumlah terbesar potensi konflik yang dimiliki):

- Kabupaten Pasaman Barat
- Kabupaten Solok Selatan
- Kabupaten Pesisir Selatan
- Kota Bukittinggi
- Kabupaten Sijunjung

## **2) Outcome**

Terjalannya koordinasi dengan instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam pencegahan konflik sosial.

## **3) Permasalahan dan Solusi**

Kurangnya dukungan anggaran dalam pembentukan tim penyusunan pemetaan dan evaluasi pemetaan konflik di Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu maka peran dan fungsi koordinasi lintas instansi perlu ditingkatkan lagi dalam menyusun pemetaan potensi konflik di Sumatera Barat serta adanya dukungan anggaran dalam memaksimalkan penyusunan pemetaan serta evaluasi pemetaan potensi konflik di Sumatera Barat.

- f. Sosialisasi Dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.82.472.500,- dan realisasi sebesar Rp.78.759.000,- (95%)

## **1) Output**

Terdatanya kelompok yang menjalankan aktivitas keagamaan yang menyimpang dan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang aliran kepercayaan yang menyimpang di tengah masyarakat. Pada tahun 2018, Badan Kesbangpol telah melakukan pemantauan di kab/kota di Sumbar terkait aliran kepercayaan masyarakat yang ada di daerah dengan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Sumbar. Berdasarkan pemantauan dan koordinasi dengan aparat pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Terdatanya 18 Aliran Sesat yakni :

Jamiyatul Islamiyah, Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI)  
Cabang Padang, Ajaran Jamaah Keimanan, Ajaran Al



Qiyadah Al-Islamiah Cabang Padang (kemudian diyakini berkembang menjadi Gafatar), Ajaran Attazkir, Tarekat Khasatariyah, Ajaran Yamisah, Ajaran Al Qiyadah Al-Islamiah Cabang Pesisir Selatan, Pengajian Abdul Karim Jamak, Al-Jamaah Quran dan Hadist, Ajaran Payung Tigo Sakaki, Ahmadiyah Tanah Datar, Ajaran Zaini Datuak Rangkayo Besar, Ajaran Kerajaan Islam Internasional, Rukun 13, Islam Jamaah, Buya Zed, dan Tarekat Naqshabandiyah Al-Khalidiyah (Dermoga).

- Aliran yang dibawah pengawasan yakni Naqshabandiyah, Ajaran Perkumpulan Siswa-siswa Alkitab Saksi-saksi Yehova, Lembaga Dakwah Islamiah Indonesia (LDII) Cabang Padang, Tauhid Centre, LDII Batusangkar Tanah Datar dan Yayasan Kharisma Usada Mustika (Yakum).
- Aliran yang tidak ditemukan lagi yakni Baha'i, Ajaran Agama Allah dan Inkarussunnah, Ajaran Ilmu Sejati dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Padang Aro.
- Aktifitas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dinyatakan sudah tidak aktif di Sumbar.
- Sedangkan untuk Ahmadiyah masih beraktifitas tetapi tidak boleh menyebarkan keyakinan dan ini langsung dibawah pengawasan Bakopakem Sumatera Barat.
- Kegiatan ini berbentuk sosialisasi bagi mahasiswa/i perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Kota Padang terkait perkembangan organisasi aliran kepercayaan masyarakat dan penanganannya. Lokasi kegiatan yaitu di Fave Hotel Padang dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang yang berasal dari Mahasiswa/wi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di Kota Padang.

## 2) Outcome

Terjalannya koordinasi dengan instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam pencegahan konflik sosial.

## 3) Permasalahan dan Solusi

Bermunculan paham sesat, pelecehan agama dan melemahkan aqidah umat Islam di Sumatera Barat. Kemunculan paham sesat ini memecah umat Islam dan terjadi gangguan keamanan di dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, perlu peran Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Timkor Pakem) yang

beranggotakan Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan organisasi keagamaan, dalam pengawasan perkembangan paham kepercayaan di masyarakat, pengawasan ini dilakukan guna mencegah terjadinya penistaan terhadap salah satu agama yang diakui oleh negara Indonesia dan keamanan serta kestabilan keamanan masyarakat.

- g. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat dengan anggaran sebesar Rp.152.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp.134.192.200,- (88,11%).

**1) Output**

Jumlah pembinaan dan koordinasi kerukunan umat beragama di Sumbar dan fasilitasi pembentukan FKUB di daerah sebanyak 10 kali rapat dan 19 Kab/kota.

**2) Outcomes**

Meningkatnya kerukunan antar umat beragama yang dilandasi toleransi dan saling menghormati.

**3) Permasalahan dan Solusi**

Masih ada kab/kota yang belum membentuk FKUB sampai saat ini. Untuk Pembentukan FKUB di daerah yang belum terbentuk, telah disurati melalui surat Gubernur.

- h. Fasilitasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dengan anggaran sebesar Rp.56.940.000,- dengan realisasi sebesar Rp.51.658.100,- (90,72%).

**1) Output**

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah anggota DPRD kab/kota . Pemerintah Daerah diharapkan dapat memfasilitasi proses penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melakukan verifikasi persyaratan administrasi calon Pengganti Antar Waktu (PAW) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka memenuhi jumlah keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah membentuk Tim Peneliti berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Adapun hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan Fasilitasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2018 terdapat 35 orang anggota DPRD kab/kota yang mengalami pergantian antar waktu.
- Terlaksananya koordinasi dan pemantauan perkembangan situasi dan kondisi daerah terhadap Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

## 2) Outcome

Terfasilitasinya pergantian antar waktu anggota DPRD Kab/Kota di Sumatera Barat.

## 3) Permasalahan dan Solusi

- Kurangnya kelengkapan administrasi terhadap pengajuan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - Adanya keberatan dari anggota DPRD yang diganti, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan, menyebabkan proses pergantian antar waktu menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - Terkait permasalahan tersebut diatas, maka solusi yang dapat dilaksanakan untuk mengatasinya adalah dengan melaksanakan koordinasi dengan Pemda Kab/Kota dan Parpol untuk melengkapi berkas administrasi calon Pergantian Antar Waktu.
  - Menunggu proses hukum dan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
- i. Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dengan anggaran sebesar Rp. Rp.197.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp.186.378.380,- (94,26%).

## 1) Output

Jumlah koordinasi dan pemantauan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sebanyak 19 kali, dengan hasil terdata beberapa hal sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten/Kota, yang terdiri dari :

NO	KAB/KOTA	PPK	PPS	TPS
----	----------	-----	-----	-----

1.	Kab. Pesisir Selatan	15	182	1.478
2.	Kab. Solok	14	74	1.314
3.	Kab. Sijunjung	8	61	716
4.	Kab. Tanah Datar	14	75	1.249
5.	Kab. Padang Pariaman	17	103	1.359
6.	Kab. Agam	16	82	1615
7.	Kab. Lima Puluh Kota	13	79	1.256
8.	Kab. Pasaman	12	37	913
9.	Kab. Kep. Mentawai	10	43	327
10.	Kab. Dharmasraya	11	52	666
11.	Kab. Solok Selatan	7	39	597
12.	Kab. Pasaman Barat	11	19	1.206
13.	Kota Padang	11	104	2.440
14.	Kota Solok	2	13	206
15.	Kota Sawahlunto	4	37	199
16.	Kota Padang Panjang	2	16	177
17.	Kota Bukittinggi	3	24	346
18.	Kota Payakumbuh	5	47	341
19.	Kota Pariaman	4	71	264
	JUMLAH	179	1.158	16.669

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, telah menetapkan Daerah Pemilihan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang terdiri dari:

NO	DAERAH PEMILIHAN	KAB/KOTA
1.	Sumatera Barat 1	Kota Padang
2.	Sumatera Barat 2	Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman
3.	Sumatera Barat 3	Kabupaten Agam Kota Bukittinggi
4.	Sumatera Barat 4	Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
5.	Sumatera Barat 5	Kabupaten Lima Puluh Kota Kota Payakumbuh

6.	Sumatera Barat 6	Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Dharmasraya Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang
7	Sumatera Barat 7	Kabupaten Solok Kabupaten Solok Selatan Kota Solok
8.	Sumatera Barat 8	Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai

- Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilu Tahun 2019, yang terdiri dari :

NO	KAB/KOTA	DPS		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Kab. Pesisir Selatan	190.106	192.651	382.757
2.	Kab. Solok	134.410	138.235	272.645
3.	Kab. Sijunjung	76.009	77.350	153.359
4.	Kab. Tanah Datar	130.610	135.719	266.329
5.	Kab. Padang Pariaman	144.232	149.595	293.827
6.	Kab. Agam	164.541	170.351	334.892
7.	Kab. Lima Puluh Kota	128.588	135.072	263.660
8.	Kab. Pasaman	95.740	97.486	193.226
9.	Kab. Kep. Mentawai	29.537	26.795	56.332
10.	Kab. Dharmasraya	69.199	68.891	138.090
11.	Kab. Solok Selatan	55.179	55.267	110.446
12.	Kab. Pasaman Barat	124.139	127.944	252.083
13.	Kota Padang	268.305	279.494	547.800
14.	Kota Solok	21.055	21.684	42.739
15.	Kota Sawahlunto	22.446	23.062	45.508
16.	Kota Padang Panjang	18.022	18.692	36.714
17.	Kota Bukittinggi	35.361	36.626	71.987
18.	Kota Payakumbuh	43.390	44.982	88.372

19.	Kota Pariaman	29.758	30.871	60.629
	JUMLAH	1.780.627	1.830.768	3.611.395

- Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada tanggal 29 Agustus 2018, oleh Komis Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 88/PK.01/BA/13/Prov/VIII/2018, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KAB/KOTA	DPTHP II		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Kab. Pesisir Selatan	162.890	167.385	330.275
2.	Kab. Solok	129.292	133.320	262.612
3.	Kab. Sijunjung	73.298	75.026	148.324
4.	Kab. Tanah Datar	126.081	131.439	257.520
5.	Kab. Padang Pariaman	138.518	144.333	282.851
6.	Kab. Agam	156.483	162.537	319.020
7.	Kab. Lima Puluh Kota	119.967	128.396	248.363
8.	Kab. Pasaman	90.785	92.925	183.710
9.	Kab. Kep. Mentawai	28975	26.180	55.155
10.	Kab. Dharmasraya	67.532	67.403	134.935
11.	Kab. Solok Selatan	54.096	54.050	108.146
12.	Kab. Pasaman Barat	122.764	125.493	248.257
13.	Kota Padang	269.799	282.018	551.817
14.	Kota Solok	21.042	21.820	42.862
15.	Kota Sawahlunto	22.520	23.140	42.862
16.	Kota Padang Panjang	18.221	18.877	37.098
17.	Kota Bukittinggi	35.760	37.009	72.769
18.	Kota Payakumbuh	42.348	44.247	86.595
19.	Kota Pariaman	30.113	31.229	61.342
	JUMLAH	1.710.484	1.766.827	3.477.311

- Pada tanggal 14 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), yang

ditetapkan dengan Berita Acara Nomor : 97/PK.01-BA/13/Prov/IX/2018, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KAB/KOTA	DPTHP II		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Kab. Pesisir Selatan	162.654	167.163	329.817
2.	Kab. Solok	129.012	133.140	262.152
3.	Kab. Sijunjung	72.641	74.450	147.091
4.	Kab. Tanah Datar	125.672	131.010	256.682
5.	Kab. Padang Pariaman	136.984	143.123	280.107
6.	Kab. Agam	156.342	162.444	318.786
7.	Kab. Lima Puluh Kota	119.819	128.272	248.091
8.	Kab. Pasaman	90.898	93.087	183.985
9.	Kab. Kep. Mentawai	28.994	26.157	55.151
10.	Kab. Dharmasraya	67.197	67.106	134.303
11.	Kab. Solok Selatan	54.191	54.126	108.317
12.	Kab. Pasaman Barat	120.089	123.452	243.541
13.	Kota Padang	269.129	281.607	550.736
14.	Kota Solok	20.877	21.709	42.586
15.	Kota Sawahlunto	22.492	23.122	45.614
16.	Kota Padang Panjang	18.202	18.870	37.072
17.	Kota Bukittinggi	35.478	36.770	72.248
18.	Kota Payakumbuh	42.321	44.231	86.552
19.	Kota Pariaman	30.104	31.217	61.321
	JUMLAH	1.703.096	1.761.056	3.464.152

- Pada tanggal 14 November 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan II Pemilu Tahun 2019, dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor : 49/PL.03.1-Kpt/Prov/XI/2018, yang terdiri dari :

NO	KAB/KOTA	DPTHP II		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Kab. Pesisir Selatan	163.207	167.752	330.959
2.	Kab. Solok	140.582	142.677	283.259

3.	Kab. Sijunjung	75.831	77.196	153.027
4.	Kab. Tanah Datar	129.611	134.801	264.412
5.	Kab. Padang Pariaman	154.054	157.819	311.873
6.	Kab. Agam	174.264	179.646	353.910
7.	Kab. Lima Puluh Kota	122.789	131.156	253.945
8.	Kab. Pasaman	93.552	95.832	189.384
9.	Kab. Kep. Mentawai	29.531	26.675	56.206
10.	Kab. Dharmasraya	71.061	70.564	141.625
11.	Kab. Solok Selatan	57.128	56.929	114.057
12.	Kab. Pasaman Barat	123.297	126.529	249.826
13.	Kota Padang	285.401	297.794	583.195
14.	Kota Solok	23.136	23.861	46.997
15.	Kota Sawahlunto	22.590	23.239	45.829
16.	Kota Padang Panjang	19.086	19.777	38.863
17.	Kota Bukittinggi	37.214	38.298	75.512
18.	Kota Payakumbuh	42.706	44.582	87.288
19.	Kota Pariaman	30.260	31.334	61.594
	JUMLAH	1.795.300	1.846.461	3.641.761

## 2) Outcome

Pemilu dan pemilu kepala daerah berjalan aman, tertib dan lancar di Sumbar

## 3) Permasalahan dan Solusi

- Adanya keberatan dari partai politik terkait daftar calon tetap Anggota Legislatif.
- Adanya keberatan dari calon anggota DPD yang dibatalkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, dan menyampaikan keberatan ke Bawaslu ke Provinsi Sumatera Barat.
- Terkait masalah di atas, maka perlu dilakukan koordinasi yang intensif dengan penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan KPU) dan Pemerintah Daerah terkait proses tahapan Pemilu agar berjalan aman, tertib dan lancar.

- j. Pengawasan Dan Pencegahan Perbuatan Maksiat dengan anggaran sebesar Rp.366.383.500,- dan realisasi sebesar Rp.341.142.026,- (93%).



### 1) Output

- Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan tanggal 09 Oktober 2018 bertempat di FAVE Hotel Padang. Peserta kegiatan Sosialisasi Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Maksiat sebanyak 65 (enam puluh lima) orang, terdiri dari para pelajar SMA dan SMK se-Kota Padang.
- Perda tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang telah disusun sebanyak 1 buah Perda yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Sedangkan untuk Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksana Perda Nomor Tahun 2018 telah selesai dibahas oleh Tim (saat ini dalam proses pembahasan di Biro Hukum Setda Prov. Sumbar). Sedangkan untuk pendampingan Penyusunan Perda Maksiat masih dalam tahap pengumpulan Data.

### 2) Outcome

Terdatanya kasus maksiat dan tersusunnya Perda Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

### 3) Permasalahan dan Solusi

- Kegiatan pengawasan dan pencegahan perbuatan maksiat, hanya bisa dilaksanakan pada 1 daerah di Sumbar, sehingga tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat di masing-masing daerah di Sumatera Barat tidak bisa dicapai secara optimal.
- Penyusunan Pergub tentang Peraturan Pelaksana Perda Nomor 8 Tahun 2018 tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Terkait permasalahan tersebut, maka perlu dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif bagi masyarakat di seluruh kab/kota di Sumbar sebagai upaya mencegah dan memberantas kasus maksiat yang semakin merajalela serta perlu koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait untuk penyelesaian penyusunan Pergub tentang Peraturan Pelaksana Perda Nomor 8 Tahun 2018.

- k. Sosialisasi Perda Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA dengan anggaran sebesar Rp.157.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.148.026.500,- (93%)

**1) Output**

Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya diadakan sebanyak 2 kali yakni

- Kabupaten Dharmasraya

Kegiatan Sosialisasi di Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018 bertempat di Hotel Sakato Jaya. Adapun peserta adalah Generasi Muda/Pelajar sebanyak 75 orang.

- Kota Pariaman

Kegiatan Sosialisasi di Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2018 bertempat di Hotel Nan Tongga Pariaman. Adapun peserta adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama sebanyak 75 orang.

Pada kegiatan tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) telah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas negara, tetapi juga menjadi bahaya global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang.
- Di lingkungan regional terutama di negara-negara ASEAN telah menunjukkan sikap dan komitmen yang sama dalam menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Hal tersebut disebabkan karena kawasan regional Asia Tenggara merupakan daerah pemasaran yang sangat besar bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan jumlah penduduk sekitar 600 juta jiwa.
- Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa masalah Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

2) **Outcome**

Terwujudnya pemahaman aparat/masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

3) **Permasalahan dan Solusi**

Berdasarkan data nasional yang ada, masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan grafik yang terus meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, begitupun dengan jumlah penggunanya. Hal ini disebabkan karena sanksi yang diberikan terhadap pengedar dan pemakai narkoba belum menimbulkan efek jera bagi pelakunya, untuk itu perlu adanya regulasi yang kuat yang dapat menimbulkan efek jera bagi pengedar dan pemakai narkoba.

**D. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

**1. Program dan Kegiatan**

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Meskipun penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk skala Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu tanggungjawab dari Polisi Pamong Praja, namun hal ini juga menjadi tanggungjawab seluruh Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, masyarakat dan aparat hukum lainnya. Secara garis besar, penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Sumatera Barat Umum tertuang dalam Program :

a. Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat melalui kegiatan :

- 1) Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Wilayah Lintas Batas Antar Provinsi Tetangga (Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu).
- 2) Pengamanan Unjukrasa dan Keramaian dengan Aparat Terkait.
- 3) Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman.
- 4) Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas.
- 5) Patroli Lapangan Dalam Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten / Kota Se-Sumatera Barat.
- 6) Koordinasi Forum Komunikasi Lintas Provinsi dan Kabupaten / Kota Se-Sumatera Barat.

- 7) Pengamanan Dan Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat VIP.
  - 8) Pengamanan dan Pengawasan Hari Pers Nasional.
  - 9) Deteksi Dini Pelanggaran Perda/Perkada dan Permasalahan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Sumatera Barat.
  - 10) Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Daerah, Nasional dan Internasional.
  - 11) Operasi Penanganan Pelanggaran Perda, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- b. Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS, melalui kegiatan :
- 1) Pelaksanaan Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - 2) Pelaksanaan Penegakan Perda No 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
  - 3) Pelaksanaan Penegakkan Perda No 8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
  - 4) Pelaksanaan Penegakan Perda Terkait Pemerintahan dan Izin.
- c. Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, melalui kegiatan :
- 1) Pengawasan Pelaksanaan Perda Nomor 11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.
  - 2) Operasi Gabungan Pemberantasan Maksiat.

## **2. Realisasi Program dan Kegiatan**

- a. Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat melalui kegiatan :
- 1) Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Wilayah Lintas Batas Antar Provinsi Tetangga (Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.027.500,- dan realisasi sebesar Rp.20.941.000,- (77.48 %), dilaksanakan di Provinsi Riau pada tanggal 17 s/d 20 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut:

### **a) Output**

Ditemukan adanya warung remang yang berada di lintas batas Sumbar – Riau tepatnya di daerah Pangkalan (Sumbar), Kelok Indah Desa Tanjung Alai (Riau), Bukit Bertabuh (Riau).

**b) Outcome**

Terwujudnya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada wilayah lintas batas antar provinsi tetangga (Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu).

**c) Permasalahan dan Solusi**

- Susahnya proses birokrasi bagi warga yang tinggal di kawasan lintas batas karena kedua wilayah sama-sama memungut IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
- Adanya masalah lalu lintas ternak yang berada di kawasan lintas batas antar Provinsi Sumbar dan Riau sehingga dikhawatirkan terjadinya Penyakit Hewan Menular seperti rabies.
- Menyikapi temuan diatas, tim dari Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar berkoordinasi dengan Satpol PP Prov. Riau terkait dengan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kawasan lintas batas antar Provinsi Sumbar dan Riau.
- Kasat Pol PP Prov. Sumbar menyarankan adanya Rapat Koordinasi Satpol PP Regional Sumatera yang membahas tentang kerjasama kewilayahan, pengadaan pos lintas batas dan pengamanan bersama lintas batas antar provinsi.

- 2) Pengamanan Unjukrasa dan Keramaian dengan Aparat Terkait dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.977.000,- dan realisasi sebesar Rp.14.737.000,- (49.16%)

**a) Output**

Jumlah pengamanan unjukrasa dan keramaian dengan aparat terkait.

**b) Outcome**

Terwujudnya pengamanan unjukrasa dan keramaian dengan aparat terkait.

**c) Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

- 3) Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.451.379.201,- dan realiasi sebesar Rp.1.434.871.118,- (98.86%).

**a) Output**

Tenaga pengaman Untuk pengamanan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat serta membantu pelaksanaan tugas Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 51 (lima puluh satu) Orang di Rumah Dinas Kepala Daerah, Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**b) Outcome**

Terwujudnya penyediaan jasa tenaga pengaman.

**c) Permasalahan dan Kendala**

Tidak ada permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

- 4) Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.238,631,800,- dan realisasi sebesar Rp.233,238,373,- (97.74%).

**a) Output**

- Satu kali dilaksanakan dalam satu tahun.
- Untuk memperingati HUT satpol PP dan satlinmas Se Sumatera Barat di Kabupaten Tanah Datar dengan Jumlah Pasukan Perkegiatan 98 (sembilan puluh delapan) Orang.

**b) Outcome**

Terwujudnya gelar pasukan Satpol PP dan Satlinmas.

**c) Permasalahan dan Kendala**

Ketersediaan anggaran belum sepenuhnya Optimal dalam mendukung kegiatan ini.

- 5) Koordinasi Forum Komunikasi Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.358,170,940,- dan realiasi sebesar Rp.343,230,499,- (95.83%).

**a) Output**

- Jumlah Rapat, 2 (dua) kali dalam satu Tahun 2018.
- Jumlah peserta dalam satu kali rapat sebanyak 60 (enam Puluh) Orang.

**b) Outcome**

Terwujudnya koordinasi forum komunikasi lintas provinsi dan kabupaten/kota se Sumatera Barat.

**c) Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

- 6) Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat VIP dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250,110,329,- dan realiasi sebesar Rp.248,234,857,- (99.25%).

**a) Ouput**

- Telah dilakukan pengamanan dan pengawalan Kepala Daerah sebanyak 69 kali.
- Telah dilakukan pengamanan dan pengawalan Wakil Kepala Daerah sebanyak 107 kali.
- Telah dilakukan pengamanan dan pengawalan Sekretaris Daerah sebanyak 19 kali.
- Dalam melakukan pengamanan dan pengawalan petugas dilapangan menyesuaikan dengan kegiatan dari kepala dan wakil kepala daerah yang dikawal, apabila kegiatan dilaksanakan di keramaian dan kondisi yang kurang kondusif maka petugas yang dilibatkan akan ditambah sesuai dengan kebutuhan dilapangan, kondisi-kondisi tertentu itu seperti pengawalan pada daerah terdampak bencana banjir, longsor, kebakaran dll, juga pada kegiatan yang berada di keramaian seperti kegiatan event Nasional maupun daerah.

**b) Outcome**

Terwujudnya pengamanan dan pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan pejabat VIP.

**c) Permasalahan dan Solusi**

- Permasalahan yang dihadapi oleh petugas dilapangan adalah pada saat pengawalan menghadapi situasi yang rawan akan tindakan anarkis dan criminal maka petugas dilapangan tidak dapat dengan maksimal dalam melakukan pengamanan karena minimnya sarana dan prasarana pencegahan.
- Oleh karena itu disarankan untuk petugas yang melakukan pengamanan dan pengawalan dibekali

dengan sarana Taser Stungun dengan standar SNI dan akan lebih bagus lagi seperti Taser X-26 atau sejenisnya, bahkan sangat memungkinkan petugas diberikan senjata sofgun/ api yang tentu saja didapat setelah melakukan seleksi psikologis dan pengurusan adminstrasi yang legal dan sah.

- 7) Pengamanan dan Pengawasan Hari Pers Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.575,549,728,- dan realiasi sebesar Rp.575,549,728,- (100%).

**a) Output**

- Pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Pengawasan HPN 2018 dapat dilaporkan sebagai berikut:
  - Pelaksanaan pengamanan terbagi pada beberapa tempat yaitu Grand Inna Hotel dan Galeri Seni Rupa Taman Budaya, Galeri Seni Rupa Taman Budaya, Danau Campago, Halaman Kantor Gubernur, GOR H. Agus Salim, Pangeran beach hotel, TVRI, Taman Muaro Lasak, Musium Adityawarman, Puskesmas Bungus, Studio RRI Sumbar, Auditorium Gubernuran, Grand Inna Hotel, Halaman Kantor PWI Sumbar, Hotel Kryad Bumi Minang, Hotel Mercure, Kantor Disnaker Prov. Sumbar.
  - Personil yang ditugaskan dalam pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Pengawasan HPN 2018 terdiri dari:
    - Personil Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar sebanyak 50 (lima puluh) orang.
    - Personil Satpol PP dan Linmas Kota Padang sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
    - Personil Polda Sumbar sebanyak 50 (lima puluh) orang.
    - Personil TNI AD sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
    - Personil TNI AL sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
    - Personil TNI AU sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

**b) Outcome**



Terwujudnya pengamanan dan pengawasan Hari Pers Nasional.

**c) Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

- 8) Deteksi Dini Pelanggaran Perda/Perkada dan Permasalahan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50,000,000,- dan realiasi sebesar Rp.48,139,471,- (96.28%).

**a) Output**

Mekanisme Deteksi dini dilakukan dengan cara mengirim tim intel kelapangan dengan penyamaran untuk menghimpun informasi dari masyarakat setempat dan dengan pengawasan langsung yang disertai dengan bukti fisik berupa audio, photo dan video, setelah data terkumpul selanjutnya tim melaporkan ke pimpinan untuk kemudian mempersiapkan koordinasi dengan Satpol PP Kota dan Kabupaten untuk melaksanakan operasi gabungan. Untuk itu, telah dilakukan deteksi dini dari awal bulan September hingga Desember 2018 pada daerah-daerah sebagai berikut :

- Kota Padang dilakukan deteksi dini pada galian C di Anak Air Kec. Koto Tangah.
- Kabupaten Padang Pariaman dilakukan deteksi dini pada inidikasi pelanggaran Perda Nomor 11 tahun 2001 tentang maksiat pada cafe-cafe yang berada di Kabupaten Padang Pariaman.
- Kota Pariaman dilakukan deteksi dini adanya pelanggaran perda terkait Galian C yang menggunakan eskafator.
- Kota Solok dan Kabupaten Agam dilakukan deteksi dini terkait dengan Tambak ilegal dan eksploitasi ikan bilih di danau singkarak yang ditangkap dengan menggunakan metode ilegal, sehingga mengancam habitat dan kelestarian ikan bilih kedepannya.
- Pada Kabupaten 50 Kota juga dilaksanakan deteksi dini terkait adanya isu oknum yang membacup para pedagang kaki lima yang berjualan si panjang fly over kelok 9, sehingga para pedagang merasa jumawa dan sulit untuk ditertibkan.

**b) Outcome**

Terwujudnya Deteksi Dini Pelanggaran Perda /Perkada dan Permasalahan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Sumatera Barat.

**c) Permasalahan dan Solusi**

- Permasalahan yang timbul pada kegiatan ini adalah masih sangat minimnya sarana dan prasara petugas yang diturunkan dilapangan, serta kurangnya kemampuan para petugas dilapangan baik itu kemampuan intelegensi dan kemampuan adaptasi lingkungan.
- Diperlukan pelatihan dan pendidikan khusus yang dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan tugas dilapangan.
- Diperlukan sarana dan prasarana yang sangat memadai bagi personil dilapangan sehingga proses pengambilan data dan informasi akan lebih falid dan maksimal baik secara audio, photo maupun video.

- 9) Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Daerah, Nasional dan Internasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.56.779.714,- (94.63%).

**a) Output**

- Telah dilakukan pengamanan dan pengawasan pada event Tour De Singkarak 2018 yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat pada 8 etape yang sudah ditentukan dengan menempatkan personil Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat.
- Adapun lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan etape adalah di Kabupaten Solok sebanyak 11 orang, Kabupaten Agam 12 orang, Kota Payakumbuh 10 orang, Kota Pariaman 13 orang, Kota Bukittinggi 11 orang, Kabupaten Dharmasraya 10 orang, Kabupaten Pasaman 11 orang, dan Kabupaten Solok Selatan sebanyak 13 orang.

**b) Outcome**

Terwujudnya Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan - Daerah, Nasional dan Internasional.

**c) Permasalahan dan Solusi**

- Dari hasil pengamanan dan pengawasan yang dilakukan dapat dilakukan dengan baik dan lancar walau masih ada beberapa kendala dilapangan seperti kurang memadainya jumlah personil yang bisa dilibatkan terkendala dengan terbatasnya anggaran pengamanan mengingat banyaknya titik titik rawan yang harus diawasi.
  - Diharapkan perlunya penambahan anggaran sehingga bisa melibatkan lebih banyak personil dalam pengamanan dan pengawasan.
- 10) Operasi Penanganan Pelanggaran Perda, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.44.881.571,- (89.76%).

**a) Output**

- Telah dilakukan operasi penanganan pelanggaran perda pelanggaran Perda Nomor 11 Tahun 2001 terkait Maksiat sebanyak 19 orang personil dengan menargetkan cafe-cafe yang ada di Kabupaten Dharmasraya, dengan hasil sebagai berikut :
- Blok B, Kecamatan Koto Salak, berhasil mengamankan 13 Botol Beer, ¼ Dirijen tuak, Sound System dan perlengkapan karaoke.
- Hotel Alam Raya, hotel Fajar Harapan, Hotel Jakarta dan Wisma Agung untuk melakukan pemeriksaan terhadap penginapan yang menyalahgunakan izin sehingga tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan bahkan di beberapa kafe sudah ada yang mengedikan kamar-kamar istirahat berukuran kecil yang dapat di indikasikan akan digunakan untuk perbuatan maksiat.
- Telah dilakukan operasi penangan pelanggaran Perda Nomor 11 Tahun 2001 dan Perda Nomor 7 Tahun 2014 dengan melibatkan personil sebanyak 18 orang didapat hasil sebagai berikut :
  - Tim Operasi Gabungan memeriksa beberapa cafe yang berada di daerah Pangkalan Tanjung Gadang dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang wanita pekerja cafe yang terindikasi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

- Telah dilakukan juga operasi penangan pelanggaran perda dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait bagan dan tambak ilegal yang ada di Danau Singkarak yang melibatkan sebanyak 47 personil selama 2 hari, dalam operasi ini telah dilakukan penertiban oleh personil dilapangan terhadap tambak-tambak ilegal yang disinyalir mengancam habitat ikan bilih yang ada di Danau Singkarak dan mengancam punahnya satu-satunya ikan yang hanya ada di danau Singkarak tersebut.

**b) Outcome**

Terwujudnya Operasi Penanganan Pelanggaran Perda Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

**c) Permasalahan dan Solusi**

- Permasalahan yang terjadi dilapangan adalah adanya beberapa tambak yang dimiliki oleh orang berpengaruh di daerah tersebut dan terkesan menghalang-halangi proses penertiban yang dilakukan oleh petugas, selain itu banyak masyarakat yang menentang karena merasa sumber penghasilan mereka akan menurun drastis jika tetap dilakukan penertiban oleh petugas.
- Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan jika dirasa perlu perlu di bentuk tim terpadu tingkat provinsi dan Kab/ kota yang melibatkan instansi terkait dan TNI/POLRI sehingga proses pengawasan dan penertiban akan berjalan lebih maksimal.

- 11) Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS, melalui kegiatan Pelaksanaan Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.522.145.145,- dan realisasi sebesar Rp.508.575.785,- (97.40%).

**a. Output**

Penertiban Non Yustisi dan Yustisi dengan Jumlah Daerah yang dilaksanakan Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 pada tahun 2018 ada 44 titik pada 16 kab/kota.

**b. Outcome**

Terwujudnya pelaksanaan penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

**c. Permasalahan dan Solusi**

- Lokasi yang sulit dijangkau.
- Masih ada sebagian masyarakat yang belum paham dengan pelaksanaan Perda Tambang.
- Penegakan hukum yang dilaksanakan Satpol PP terbatas tambang yang berizin.
- Minimnya anggaran untuk penegakan perda.
- Terkait masalah diatas, maka perlu Peningkatan kerjasama antara penegak hukum terkait.
- Peningkatan sarana dan perlengkapan penunjang kegiatan.
- Penambahan anggaran.

- 12) Pelaksanaan Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.47.156.300,- (94.31%).

**a. Output**

Sosialisasi percepatan pembuatan perda Trantib, penertiban non yustisi. Jumlah Daerah yang pelaksanaan penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 sebanyak 18 kab/kota.

**b. Outcome**

Terwujudnya Pelaksanaan Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

**c. Permasalahan dan Solusi**

- Masih banyak nya kab/kota yang belum rampung Perda Trantibnya.
- Minimnya Anggaran untuk penegakan perdanya.
- Terkait masalah tersebut, maka perlu mendukung Kab/kota mempercepat Pembuatan Perda Trantibnya.
- Penambahan Anggaran untuk penegakan Perda.

- 13) Pelaksanaan Penegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.49.296.600,- (98.59%).

**a. Output**

Sosialisasi Penertiban Non Yustisi dan Jumlah Kab/Kota yang tidak melaksanakan Penegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok 9 kab/kota.

**b. Outcome**

Terwujudnya Pelaksanaan Penegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

**c. Permasalahan dan Solusi**

- Masih Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak asap rokok terhadap orang lain.
- Masih ada beberapa daerah yang belum memiliki perda Kawasan Tanpa Rokok.
- Terkait masalah tersebut, maka perlu eminta kepada dinas kesehatan untuk mensosialisasikan tentang Perda Nomor 8 Tahun 2012.
- Mendorong kab/kota untuk membentuk perda Kawasan Tanpa Rokok.

- 1) Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, melalui kegiatan :

- 1) Pengawasan Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.425.088.385,- dengan realisasi sebesar Rp.418.115.169,- (98.36%).

**a) Output**

Penegakan dalam bentuk Non Yustisi dan yustisi. Jumlah kab/kota dalam yang melakukan pengawasan/pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan maksiat pada 18 kab/kota.

**b) Outcome**

Terwujudnya pengawasan pelaksanaan penegakan Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.

**c) Permasalahan dan Solusi**

- Masih lemahnya Perda karena tidak ada sanksi pidana yang menjerat pelaku.
  - Masih minimnya anggaran yang mendukung kegiatan ini.
  - Terkait itu, maka perlu mempercepat perubahan perda tentang maksiat.
  - Penambahan anggaran untuk kegiatan ini.
- 2) Operasi Gabungan Pemberantasan Maksiat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.113,432,400,- dan realisasi sebesar Rp.109,822,574,- (96.82%).

**a) Output**

- Operasi yang dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat tanggal 25 s/d 26 Januari 2019.
- Operasi yang dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 28 s/d 29 Maret 2018.
- Operasi yang dilaksanakan di Kabupaten 50 Kota pada tanggal 21 s/d 22 April 2018.
- Operasi yang dilaksanakan di Kota Payakumbuh pada tanggal 28 s/d 29 April 2018.
- Operasi yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi pada tanggal 5 s/d 6 Mei 2018.
- Selanjutnya operasi yang dilakukan di Kabupaten Agam pada tanggal 9 s/d 10 Mei 2018.
- Operasi yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 19 s/d 20 Mei 2018.
- Operasi Gabungan Pemberantasan Maksiat dilaksanakan tanggal 28 s/d 28 Mei 2018 di Kab. Solok Selatan.
- Operasi Gabungan Pemberantasan Maksiat dilaksanakan tanggal 2 s/d 3 Juni 2018 di Kota Sawahlunto.
- Operasi Gabungan Pemberantasan Maksiat dilaksanakan tanggal 9 s/d 10 Juni 2018 di Kota Pariaman.
- Operasi Gabungan Pemberantasan Maksiat dilaksanakan tanggal 7 s/d 8 Juli 2018 di Kabupaten Agam.

- Operasi Gabungan Pemberantasan Maksiat dilaksanakan tanggal 18 s/d 19 April 2018 di Kota Solok.
- Operasi Gabungan Pemberantasan Maksiat dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2018 dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sawahlunto, terkait dengan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

**b) Outcome**

Terwujudnya operasi gabungan pemberantasan maksiat.

**c) Permasalahan dan Solusi**

- Permasalahan yang sering timbul dilapangan adalah seringnya operasi yang sudah direncanakan jauh-jauh hari namun pada saat hari H bocor sehingga tidak mendapatkan target apapun, di duga ada oknum yang sudah membocorkan namun karna kurangnya bukti digaan tersebut tidak bisa di kemukakan di dalam rapat evaluasi.
- Adanya oknum-oknum aparat yang bertindak sebagai pembacup tempat-tempat yang di duga digunakan sebagai tempat transaksi seksual dan menjual minuman keras dengan kadar alcohol di atas ambang batas yang sudah ditentukan oleh perda setempat.
- Dari segi administrasi kurangnya anggaran yang ada pada Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar dan Satpol PP dan Damkar Kabupaten/ Kota membuat operasi gabungan sangat sulit dilaksanakan secara rutin dan continius karena pada saat satu kali operasi akan meyedot biaya yang sangat banyak.
- Oleh karena itu perlu rasanya diingkatkan anggaran baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabapeten/ Kota yang ada di Sumatera Barat agar kegiatan pemberantasan maksiat berjalan dengan maksimal.

## **E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

### **1. Program dan Kegiatan**

Pada Tahun Anggaran 2018, BPBD Provinsi Sumatera Barat memiliki total alokasi anggaran sebesar Rp.21.140.484.340,52 yang terdiri dari



Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.580.461.506,52 dan Belanja Langsung sebesar Rp.16.560.022.834,- untuk melaksanakan 10 program dan 49 kegiatan. Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat, BPBD Provinsi Sumatera Barat telah menuangkannya ke dalam beberapa program dan kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Mitigasi Bencana, dengan 4 kegiatan yaitu :
  - 1) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana.
  - 2) Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana.
  - 3) Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan.
  - 4) Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan.
- b. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, dengan 7 Kegiatan, yaitu:
  - 1) Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.
  - 2) Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan.
  - 3) Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops Penanggulangan Bencana.
  - 4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana.
  - 5) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana.
  - 6) Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana.
  - 7) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana, terdiri atas 4 kegiatan yaitu:
  - 1) Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana.
  - 2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana.
  - 3) Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana.
  - 4) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan, terdiri atas 2 kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana.
  - 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- e. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana, terdiri atas 2 kegiatan yaitu:
- 1) Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat.
  - 2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana.

## **2. Realisasi Program dan Kegiatan**

- a. Program Peningkatan Mitigasi Bencana, dengan 4 kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran Alokasi Anggaran sebesar Rp.276.583.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.227.058.302,- atau sebesar 82,09%.

### **a) Output**

Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Penanggulangan Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 provinsi dan 19 kab/kota.

### **b) Outcome**

Sinergisnya program penanggulangan bencana antara Kabupaten/Kota dan Provinsi 100%.

### **c) Permasalahan dan Solusi**

- Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
- Penghimpunan data kebencanaan dari Kabupaten/Kota sering tidak tepat waktu dan tidak lengkap. Hal tersebut dapat mempengaruhi keakuratan dan penyebarluasan data kebencanaan yang berfungsi sebagai salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana baik itu di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
- Adanya SILPA perjalanan dinas dalam daerah dikarenakan keterbatasan dana GU dan belanja makan minum kegiatan tidak dapat dilaksanakan

karena ada beberapa kabupaten/kota yang belum menyampaikan data

- Terkait masalah diatas, maka perlu ditingkatkan komitmen BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana, serta ketersediaan data kebencanaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai tupoksi dan kewenangan dinas/instansi dan daerah masing-masing

- 2) Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.196.541.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.169.810.867,- atau sebesar 86,40%.

**a) Output**

Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Daerah Prov. Sumbar 1 Kegiatan.Penyusunan perencanaan kebijakan penanggulangan bencana dilakukan dengan melaksanakan penyusunan rencana kontingensi (Renkon) dan standar operasional prosedur (SOP) Bencana.

**b) Outcome**

tersedianya dokumen Aksi Daerah Provinsi Sumatera Barat 1 dokumen.

**c) Permasalahan dan Solusi**

- Luasnya cakupan wilayah kerja dalam rangka pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Kontingensi sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya.
- Tidak semua Kabupaten/Kota yang telah memiliki Dokumen Kontingensi.
- Terkait permasalahan tersebut, maka perlu memaksimalkan potensi yang ada dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Kontingensi, serta lebih memperhatikan standar harga barang dan jasa.

- 3) Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.97.679.180,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.77.037.288,- atau sebesar 78,87%.

**a) Output**

Tersusunnya data daerah rawan bencana (buku) dan rapat koordinasi data daerah rawan bencana 1 dokumen dan 1 pertemuan. Umumnya 19 Kab/Kota terpapar rawan bencana.

**b) Outcome**

tersedianya koordinasi operator pengelola data kebencanaan dalam penyusunan data dan informasi kebencanaan di Kab/kota se-Sumatera.

**c) Permasalahan dan Solusi**

- Server DIBI hanya di BPBD Provinsi Sumatera Barat, sedangkan BPBD Kabupaten/Kota mengirimkan data dengan program excel, sehingga data informasi sesuai dengan kebutuhan tidak lengkap tersedia pada waktu pengumpulan data berakibat hasilnya tidak optimal pada waktu menganalisa.
- Belanja perjalanan dinas tidak dapat direalisasikan penuh dikarenakan keterbatasan SDM.
- Terkait permasalahan diatas, kedepannya direncanakan akan membangun jaringan sistem Informasi Kebencanaan di 19 kabupaten/kota dan membuat format pengumpulan data dan petunjuk teknis disusun dan dipersiapkan diawal kegiatan pengumpulan data serta melakukan efisiensi perjalanan dinas.

- 4) Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.894.414.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.782.080.606,- atau sebesar 87,44%

**a) Output**

terlaksananya publikasi media, pembuatan baliho dan brosur serta terlaksananya sosialisasi kebencanaan kepada aparatur kab/kota 3000 lembar leaflet /brosur dan 1 kali/50 orang.

**b) Outcome**

terdesiminasi data kebencanaan kepada masyarakat.

**c) Permasalahan**

- Peserta yang hadir pada kegiatan Informasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana belum sesuai

dengan yang diharapkan, karena peserta yang dikirim dari daerah tidak sesuai dengan tugas dari Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

- Kabupaten/kota pada waktu sosialisasi belum seluruhnya datang sehingga penyempurnaan data dan informasi belum optimal sampai kepada peserta.
- Terdapat efisiensi pada belanja jasa akomodasi dan transportasi karena hasil negosiasi dibawah pagu anggaran dan penyesuaian jasa transportasi dengan peserta yang tidak hadir.
- Terkait permasalahan diatas, maka solusinya adalah ketika melakukan kegiatan sosialisasi kebencanaan aparatur diharapkan dapat dilaksanakan di triwulan I atau II agar dapat diikuti dengan maksimal oleh para peserta.
- Diperlukan kerjasama multi pihak dengan melibatkan instansi terkait kebencanaan, sehingga informasi yang disampaikan lebih luas dan lebih menyeluruh.

b. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, dengan 7 Kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.461.458.750,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.445.269.462,- atau sebesar 96,49%.

**a) Output**

terlaksananya pembentukan nagari tangguh bencana tahun 2018 sebanyak 2 nagari/ 2 kabupaten/kota, terlaksananya pembinaan nagari tangguh bencana tahun 2 nagari/1 kabupaten/kota serta terlaksananya sosialisasi destana 3 kali.

**b) Outcome**

meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

**c) Permasalahan dan Solusi**

- Waktu pelaksanaan kegiatan yang hanya 5 kali pertemuan dirasa kurang karena ada beberapa materi yang harus diberikan pemahaman mendalam terlebih dahulu ke peserta dan kadang-kadang memakan waktu yang panjang.

- Jumlah keterwakilan peserta dari perempuan dan kelompok rentan masih kurang.
  - Terkait masalah diatas, solusinya adalah dengan memberikan materi semaksimal mungkin sehingga indikator minimal untuk pembentukan suatu nagari/desa/kelurahan tangguh bencana dapat dipenuhi, serta mendorong keikutsertaan peserta dari perempuan dan kelompok rentan di masing-masing nagari.
- 2) Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.397.532.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.259.999.246,- atau sebesar 85,40%.
- a) Output**
- terlaksananya simulasi/pelatihan penanggulangan dalam 1 tahun 145 orang.
- b) Outcome**
- meningkatnya keterampilan aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- c) Permasalahan dan Solusinya**
- Proses keseluruhan kegiatan pelatihan/simulasi tidak mempunyai perencanaan teknis operasi secara detil.
  - Kurangnya persiapan teknis kepanitiaan dan briefing internal.
  - Adanya perubahan lokasi kegiatan yang semula direncanakan di luar kota dipindahkan ke dalam kota.
  - Kurangnya peserta yang hadir dari yang ditargetkan.
  - Terkait masalah diatas, maka solusi mengatasinya adalah perlu mengintensifkan rapat-rapat teknis sebelum simulasi, dan perlunya ditingkatkan komitmen antara BPBD provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota
- 3) Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.091.658.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.947.007.300,-;
- a) Output**
- Terfasilitasinya petugas Pusdalops PB 52 org/9 bulan.
- b) Outcome**

berfungsinya Pusdalops PB Prov.Sumbar secara maksimal.

**c) Permasalahan dan Solusi**

Terjadinya SILPA pada beberapa rekening belanja seperti hononarium Pengawas, anan dinas dan makan minum rapat dikarenakan adanya efisiensi jumlah pengawas dari hasil pemeriksaan Inspektorat, dan keterbatasan waktu pelaksanaan disebabkan pengesahan anggaran perubahan yang sudah mendekati akhir tahun sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu, solusinya adalah ketika APBD Perubahan, direncanakan untuk menambah anggaran berupa pembayaran honor anggota Satgas Pusdalops PB yang sebelumnya bertanggung selama 9 (sembilan) bulan dan dapat ditampung sesuai usulan sebanyak 12 (dua belas) bulan.

- 4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana alokasi anggaran sebesar Rp.114.125.790,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.130.919.694,- atau sebesar 90,84%.

**a) Ouput**

Terlaksananya pelatihan dan pembinaan TRC penanggulangan bencana Provinsi/Kabupaten/Kota 1 Provinsi dan 19 kabupaten/Kota (52 orang, 1 kali). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 9 Mei 2018 di hotel royal denai kota bukitinggi.kegiatan dilakuka dalam bentuk praktek/simulasi oleh indstruktutr melibatkan peserta dengan arahan dari narasumber.dan evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh peserta dengan pengisian angket yang telah disiapkan oleh panitia, evaluasi terhadap materi yang disampaikan.

**b) Outcome**

meningkatnya kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi bencana.

**c) Permasalahan dan Solusi**

Terjadinya SILPA pada belanja BBM, Penggantian Transportasi Peserta, instruktur, Honorarium Narasumber dan Belanja Penggandaan diakrenakan adanya perubahan lokasi pelaksanan kegiatan,

perubahan permintaan peserta kabupaten/kota terpilih, ketidak hadirannya narasumber pusat dan belum terselesaikannya laporan pelaksanaan kegiatan dikarenakan keterbatasan SDM yang ada untuk mengelola pelaksanaan kegiatan. Solusi untuk permasalahan diatas adalah dengan tetap memaksimalkan potensi yang ada dalam menyelesaikan proses pelaksanaan kegiatan.

- 5) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana alokasi anggaran sebesar Rp.630.154.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.606.486.268,- atau sebesar 96,24%.

a) Output

Terlaksananya pembinaan kelembagaan PRB, terlaksananya jambore pengurangan resiko bencana tingkat Provinsi Sumbar 1 kali (19 kab/kota, 285 orang, 4 hari) dan terlaksananya keikutsertaan dalam peringatan bulan PRB Nasional. Dilaksanakan di Kota Padang, narasumber berasal dari BNPB, BPBD Provinsi dan Pakar/Tenaga Ahli. Kegiatan ini dilaksanakan di pantai caroline, kota padang pada tanggal 3 s.d 7 September 2018, peserta adalah sebanyak 19 kontingen kabupaten/kota. Adapun bentuk kegiatan berupa peningkatan kapasitas dengan pemberian materi dan sharing knowledge dalam penanggulangan bencana dan aneka lomba yang meliputi lomba cerdas cermat, lomba PPGD, lomba dapur umum, lomba pasang bongkar tenda dan lomba manajemen posko.

b) Outcome

meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

c) Permasalahan dan Solusi

- Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam memfasilitasi pembentukan KSB (Kelompok Siaga Bencana) di daerah masing- masing.
- Terbatasnya SDM untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.



- Masih kurangnya dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
  - Terkait permasalahan diatas, maka perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing- masing.
- 6) Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana alokasi anggaran sebesar Rp.1.094.387.040,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.939.784.300,- atau sebesar 85,87%.
- a) Output**
- Terlaksanaan pembinaan relawan kebencanaan kabupaten/kota 1 kabupaten (372 orang relawan/3 kali).
- b) Outcome**
- Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kabupaten/kota.
- c) Permasalahan dan Solusinya**
- Kurangnya waktu pembelajaran mengingat padatnya materi yang diberikan kepada peserta.
  - Adanya perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan dan keterlambatan usulan dan pemindahan lokasi kegiatan didaerah kegiatan.
  - Adanya keterbatasan waktu dan kesempatan rapat akhir kegiatan.
  - Terkait permasalahan diatas, maka perlu menambah jam pelajaran sampai dengan pukul 21.00 WIB.
  - Praktek/simulasi dilakukan hanya berkelompok dengan materi yang berbeda-beda untuk masing-masing kelompok.
- 7) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah dengan alokasi anggaran Rp.35.082.700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.35.050.200,- atau sebesar 99,91%
- a) Output**
- Terlaksananya rapat kerja antar kelembagaan penanggulangan bencana di Sumatera Barat 1 kali.

**b) Outcome**

Meningkatnya kesiapsiagaan aparaturnya dalam menghadapi bencana.

**c) Permasalahan dan Solusi**

- Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam membentuk dan memfasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) di daerah masing-masing.
- Masihnya kurangnya dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan aparaturnya dalam menghadapi bencana.
- Untuk itu perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan aparaturnya dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing-masing.

c. Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana, terdiri atas 5 kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.195.363.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.134.777.600,- atau sebesar 88,99%.

**a) Output**

Terkoordinasinya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (rapat koordinasi, investigasi daerah rehabilitasi dan rekonstruksi).

**b) Outcome**

Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 19 Kabupaten/kota.

**c) Permasalahan dan Solusi**

- Keterbatasan SDM yang ada untuk mengelola pelaksanaan kegiatan.
- Pengesahan anggaran perubahan yang sudah mendekati akhir tahun sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan seperti belanja perjalanan dinas dalam daerah.
- Terkait permasalahan tersebut, maka perlu peningkatan dan memaksimalkan kemampuan yang ada.

- 2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.195.543.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.160.374.895,- atau sebesar 82,01%.

**a) Output**

terlaksananya monev dan verifikasi usulan rehabilitasi dan rapat evaluasi dan terfasilitasinya usulan dan pelaksanaan rehabilitasi daerah pasca bencana. 19 kab/kota, 1 provinsi dan 1 laporan.

**b) Outcome**

terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana.

**c) Permasalahan dan Solusi**

- Belum memadainya dana APBD yang disediakan kabupaten/kota untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di masing – masing daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan belum maksimal dan membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- Sebagian besar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah langsung dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait tanpa melibatkan BPBD Kabupaten/Kota.
- Belum memadainya sumber daya manusia aparatur penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi dalam menghitung kerusakan dan kerugian (DaLA) Kabupaten/Kota.
- Kewenangan terhadap Aset yang rusak selalu menjadi factor penghambat kabupaten/kota dalam mengusulkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Masih kurangnya komitmen beberapa kabupaten/kota dalam menyelesaikan kewajiban menyerahkan laporan akhir terhadap bantuan periode sebelumnya dari BNPB, sehingga berdampak kepada hambatan/penundaan pemberian bantuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diusulkan.
- Terkait permasalahan diatas, maka perlu Memfasilitasi Kabupaten/Kota dan memberikan

dukungan usulan bantuan pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana.

- Melakukan pertemuan rutin, berkala dan khusus yang melibatkan seluruh BPBD Dan SKPD teknis kab/kota dalam rangka menghindari pendanaan dan usulan rehabilitasi dan rekonstruksi ganda.
- Melakukan Koordinasi dan pertemuan khusus dengan BPBD dan SKPD teknis terkait dalam menetapkan usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi guna menghindari tumpang tindih usulan dan pendanaan serta guna ditetapkannya kewenangan pelaksana infrastruktur dan sarana prasarana umum serta social oleh pemerintah daerah.

3) Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.180.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.150.344.833,- atau sebesar 83,52%.

**a) Output**

Terlaksananya pertemuan teknis jitu pasna prov. Sumatera Barat (Bimtekpengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU Pasna) 50 orang peserta pengenalan JITU-PASNA.

**b) Outcome**

Meningkatnya pemahaman penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi tentang penilaian JITU PASNA.

**c) Permasalahan dan Solusi**

- Tidak tersedianya waktu pembelajaran untuk praktek lapangan mengingat padatnya materi yang diberikan kepada peserta.
- Kurang luasnya ruangan yang tersedia pada saat melakukan praktek/simulasi, sehingga tidak semua peserta dapat melakukan praktek langsung.
- Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
- Terkait permasalahan diatas, maka perlu menambah jam pelajaran sesuai kebutuhan dan kesepakatan dengan peserta.
- Praktek/simulasi dilakukan hanya per kelompok dengan materi/objek yang berbeda-beda untuk masing – masing kelompok.

- Perlu adanya kebijakan pimpinan terkait pemerataan sumber daya manusia aparatur untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
- 4) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 alokasi anggaran sebesar Rp.76.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.73.788.207,- atau sebesar 96,33%;
1. **Output**  
Terlaksananya monev dan verifikasi usulan rehabilitasi, rapat evaluasi dan terfasilitasinya usulan dan pelaksanaan rehabilitasi daerah pasca bencana 19 kab/kota, 1 provinsi dan 1 laporan.
  2. **Outcome**  
Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana 100%.
  3. **Permasalahan dan Solusi**  
Pada umumnya tidak adanya masalah berarti karena merupakan dana hibah dari BNPB sebagai lanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya.
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan, terdiri atas 2 kegiatan yaitu:
- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana dengan Aloaksi anggaran sebesar Rp.182.556.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.147.695.425,- atau sebesar 80.90%.
    - a) **Ouput**  
Tersedianya rambu – rambu evakuasi bencana 1 tahun.
    - b) **Outcome**  
Meningkatnya sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana.
    - c) **Permasalahan dan Solusinya**
      - Pengesahan anggaran perubahan yang sudah mendekati akhir tahun sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
      - Keterbatasan SDM yang ada untuk mengelola pelaksanaan kegiatan.
      - Terkait permasalahan diatas, maka solusinya adalah dengan tetap memaksimalkan potensi yang ada

dalam menyelesaikan proses pengadaan yang dapat dilaksanakan.

- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat Bencana alokasi anggaran sebesar Rp.401.068.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.358.043.685,- atau sebesar 89.25%.

**a) Output**

Tersedianya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana dan peralatan kebencanaan 1 tahun (masukan bentuk/jumlah saran dan prasarannya).

**b) Outcome**

Meningkatnya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana.

**c) Permasalahan dan Solusinya**

Adanya SILPA perjalanan dinas dalam daerah dikarenakan keterbatasan dana GU dan Belanja Publikasi kegiatan tidak dapat dilaksanakan uji fungsi peralatan secara maksimal karena disebabkan keterbatasan waktu. Untuk itu perlu meningkatkan koordinasi dengan BNPB, dan mengusahakan kegiatan ini pada awal tahun.

- e. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana, terdiri atas 2 kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.518.525.000,- dengan realisasi sebesar Rp.433.474.342,- atau sebesar 82.60%.

**a) Output**

Terlaksananya penanganan tanggap darurat bencana secara terpadu dan terkoordinir 1 kali/116 org (Provinsi Sumbar dan kab/kota).

**b) Outcome**

Berfungsinya dan meningkatnya kemampuan evakuasi korban.

**c) Permasalahan dan Solusi**

- Masih diperlukan administrasi yang lengkap dan tertib dalam penanganan tanggap darurat bencana.
- masih perlu peningkatan pelaksanaan koordinasi dilapangan antara BPBD Kabupaten/Kota, OPD, Instansi serta lembaga terkait kebencanaan.

- Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.
  - Terkait hal tersebut, maka perlunya komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam peningkatan penanganan tanggap darurat bencana .
- 2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.189.951.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.179.911.486,- atau sebesar 94.71%.
- a) Output**
- Termonitornya dan terevaluasinya pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana provinsi dan kab/kota.
- b) Outcome**
- Berfungsinya dan meningkatnya kemampuan evakuasi korban bencana.
- c) Permasalahan dan Solusi**
- Diperlukannya administrasi yang lengkap dan tertib dalam masa tanggap darurat bencana.
  - Masih perlu peningkatan pelaksanaan koordinasi dilapangan antara BPBD Kabupaten/Kota dalam pelaporan dan pelaksanaan penggunaan dana yang telah dialokasikan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
  - Terkait permasalahan tersebut, maka perlu adanya Komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam pada saat tanggap darurat ke peralihan darurat.